SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output),* hasil *(outcome),* dampak (*impact).*

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
e. BAB V PENUTUP

(3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1636
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Nagian Hukum Setdako Batam

Joko Satrio Sasongko, S.H.
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001
Kepala Bagian Hukum Setdako Batam

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 66 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 – 2029 resmi digunakan setelah disahkan oleh Wali Kota Batam dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Batam, 22 September 2025
Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam

Drs. Ardiwinata
Pembina Utama Muda
NIP.19690629 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 12
1.3 Maksud dan Tujuan 15
1.4 Sistematika Penulisan 15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 17
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 17
2.1.2. Sumber Daya Disbudpar 56
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam 101
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 113
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 114
2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 117
2.3 Telaahan Dokumen Lainnya 117
2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 126
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 129
3.1 Tujuan dan Sasaran 129
3.2 Strategi dan Kebijakan 134
3.2.1 Strategi 135
3.2.2 Kebijakan 140
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 142
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD 142
4.1.1. Teknik Merumuskan Program 143
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 269
BAB V PENUTUP 281

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyuunan Renstra Perangkat Daerah..... 7
Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Batam..... 17
Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Destinasi Wisata Per Kecamatan Di Batam..... 18
Tabel 2.3 Daftar Objek Wisata (Pantai) Batam Per Kecamatan 18
Tabel 2.4 Daftar Wisata (Agro & Eco) Batam Per Kecamatan 20
Tabel 2.5 Daftar Wisata (Religi) Batam Per Kecamatan..... 22
Tabel 2.6 Daftar Wisata (Sejarah) Batam Per Kecamatan 23
Tabel 2.7 Daftar Wisata (Budaya) Batam Per Kecamatan 24
Tabel 2.8 Daftar Wisata (Olahraga) Batam Per Kecamatan 25
Tabel 2.9 Daftar Wisata Pelabuhan/Dermaga Batam Per Kecamatan..... 27
Tabel 2.10 Daftar Wisata (Buatan) Batam Per Kecamatan..... 28
Tabel 2.11 Daftar Wisata (Jembatan) Batam Per Kecamatan..... 29
Tabel 2.12 Data Pegawai Disbudpar Kota Batam Berdasarkan Golongan Ruang . 57
Tabel 2. 13 Data Pegawai Disbudpar Kota Batam berdasarkan Pendidikan..... 59
Tabel 2.14 Data Pegawai Disbudpar Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin..... 60
Tabel 2.15 Daftar Aset peralatan dan Mesin Disbudpar Kota Batam 61
Tabel 2.16 Daftar Aset Gedung dan Bangunan Disbudpar Kota Batam..... 89
Tabel 2.17 Daftar Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi..... 94
Tabel 2. 18 Daftar Aset tetap Lainnya 95
Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Disbudpar Kota Batam 103
Tabel 2.20 Sasaran Layanan..... 114
Tabel 2.21 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 117
Tabel 2. 22 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kota Batam..... 125
Tabel 2.23 Isu Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025-2029..... 126
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam . 131
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 136
Tabel 3.3 Tahapan Strategi Disbudpar Kota Batam Tahun 2025-2029..... 138
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Disbudpar Tahun 2025-2029..... 140
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program..... 143
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Disbudpar Kota Batam..... 184
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Disbudpar yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam..... 270
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam 273
Tabel 4.5 Program Unggulan dan Prioritas..... 275

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja, merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah sesuai dengan kewenangannya. Dinas Tipe A adalah Dinas yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 4 (empat) bidang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra berfungsi sebagai:

1. Acuan untuk rencana kerja 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga:
   a. Kepala Perangkat Daerah dapat menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   b. Renja yang disusun tetap mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

c. Renstra menjadi bahan acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD, sehingga tercapai konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah.

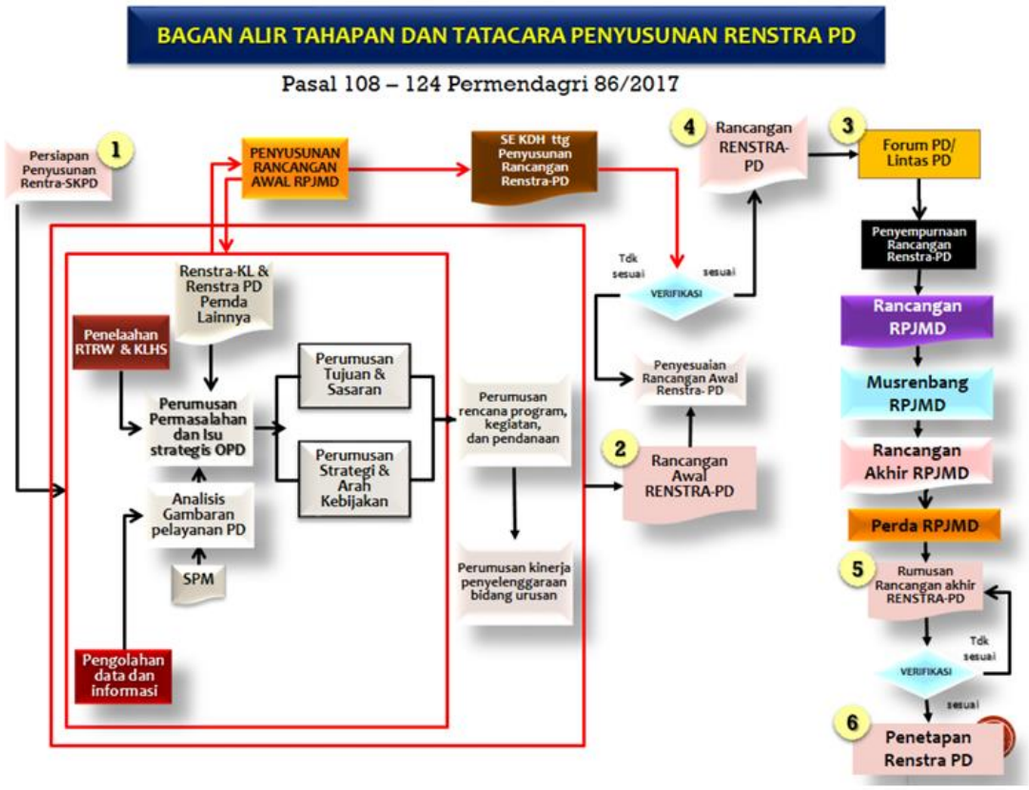
3. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan dalam pengendalian kebijakan Renja, serta sebagai bahan/pedoman/acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terukur, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga tercapai keselarasan antara perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Bagan alur atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyuunan Renstra Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
d. penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. analisis gambaran pelayanan,
2. analisis permasalahan,
3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya,
4. analisis isu strategis,

5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD
6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah,
7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Disbudpar untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Disbudpar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Disbudpar menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Disbudpar. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Disbudpar. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Disbudpar untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

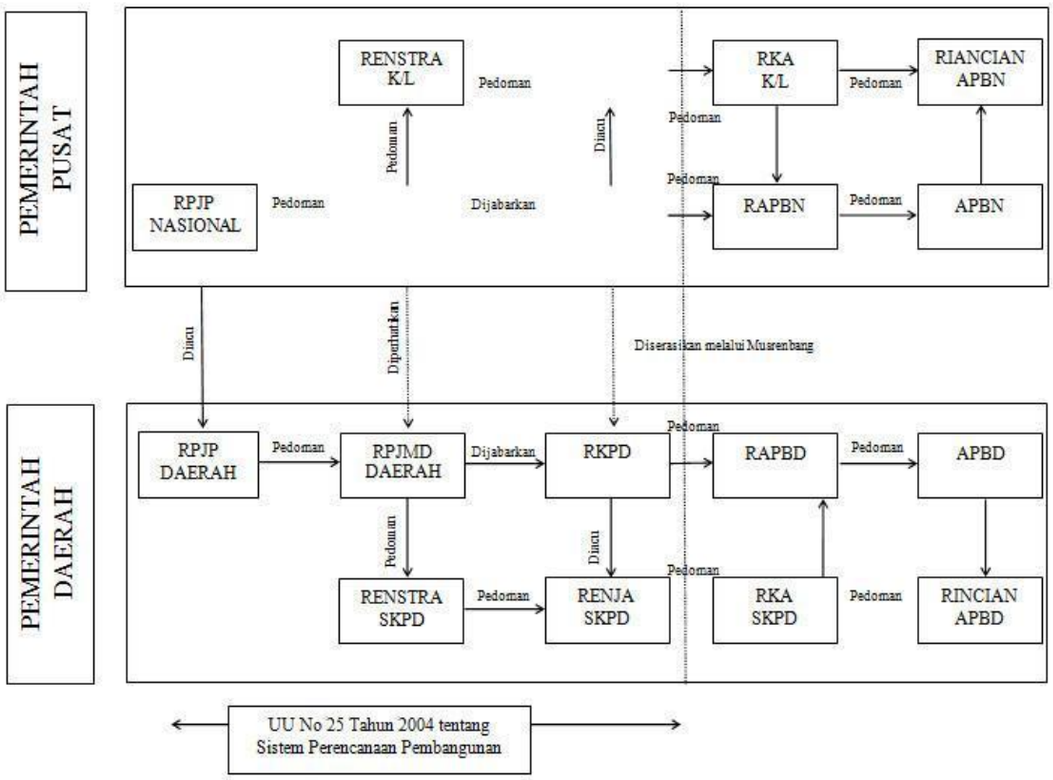
Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Disbudpar menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Disbudpar, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat

Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Disbudpar untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Disbudpar menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:



Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L

dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Renstra Disbudpar Kota Batam diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kab / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: 4,18/2025);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30) Seri C;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6)
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1379);

21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Peencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di Disbudpar selama periode 2025 - 2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029. Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Disbudpar Kota Batam disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahaan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Disbudpar Kota Batam, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Disbudpar Kota

Batam. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Disbudpar Kota Batam yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Bagtam Tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Disbudpar yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kota Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau, berada dijalur pelayaran internasional dan perdagangan dunia menjadikan Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, secara geografis Kota Batam mempunyai luas 1.034,732 (seribu tiga puluh empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) km² yang terdiri dari 454 buah pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kota Batam dibagi menjadi 12 kecamatan dengan 64 kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Batam

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Kelurahan
1	Belakang Padang	68,55	6
2	Bulang	158,93	6
3	Galang	353,24	8
4	Sungai Beduk	105,97	4
5	Sagulung	54,95	6
6	Nongsa	108,37	4
7	Batam Kota	38,54	6
8	Sekupang	68,53	7
9	Batu Aji	41,82	4
10	Lubuk Baja	11,16	5
11	Batu Ampar	10,96	4
12	Bengkong	13,71	4
Kota Batam		**1.034,732**	**64**

Sumber : Perda RPJPD Kota Batam 2025-2045

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Destinasi Wisata Per Kecamatan Di Batam

Kecamatan	Pantai	Agro/ Eco	Religi	Sejarah	Budaya	Olahraga	Pelabuhan	Buatan	Jembatan	TOTAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Nongsa	17	6	1	3	2	8	3	2	1	**43**
Batu Aji	0	0	1	1	0	2	0	0	0	**4**
Sagulung	0	1	0	1	0	2	1	1	1	**7**
Galang	24	3	5	4	0	0	1	0	4	**41**
Belakang Padang	2	0	1	3	0	0	1	1	0	**8**
Sekupang	7	7	6	1	0	10	5	6	0	**42**
Lubuk Baja	1	0	7	0	0	3	0	0	0	**11**
Sei Beduk	1	2	0	0	0	2	0	0	0	**5**
Batam Kota	2	2	3	1	1	11	1	4	0	**25**
Batu Ampar	1	0	4	0	0	3	2	0	0	**10**
Bengkong	2	2	2	1	0	4	1	4	0	**16**
Bulang	2	1	1	1	1	1	0	0	1	**8**
JUMLAH	**59**	**24**	**31**	**16**	**4**	**46**	**15**	**18**	**7**	

Tabel 2.3 Daftar Objek Wisata (Pantai) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Tanjung Memban	Kel. Batubesar	
2	Pantai Melayu	Kel. Batubesar	
3	Nongsa	Kel. Sambau	
4	Telukmata Ikan	Kel. Sambau	
5	Batubesar	Kel. Batubesar	
6	Pulau Putri Nongsa	Kel. Sambau	
7	Pantai Bale-Bale	Jalan Hang Lekiu KM. 4, Tua Bakau Serip Pantai, Sambau	
8	Sekilak	Kel. Batubesar	
9	Pantai Lagorap	Kel. Batubesar	
10	Pantai Ketapang	Kel. Batubesar	
11	Pantai Boneta	Kel. Batubesar	
12	Pantai Tanda Pesona	Kel. Batubesar	
13	Nuvasa Bay (Pantai Palm Spring	Kabil	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Pantai Biru Sehati	Kabil	
15	Pantai Panau	Kabil	
16	Pantai Bahagia	Sambau,	
17	Pantai Payung	Kel. Batubesar	
KEC. BATU AJI			
KEC. SAGULUNG			
KEC. GALANG			
1	Pantai Melayu Barelang	Kel. Rempangcate	
2	Pantai Melur Barelang	Kel. Sijantung	
3	Pulau Abang	Kel. Pulau Abang	
4	Pulau Hantu	Kel. Pulau Abang	
5	Pulau Rano	Kel. Pulau Abang	
6	Pulau Karas	Kel. Karas	
7	Permata Subangmas	Kel. Subangmas	
8	Pantai Mirota	Kel. Sijantung	
9	Pantai Vio-Vio	Kel. Sijantung	
10	Pantai Dendang Melayu	Kel. Sijantung	
11	Pantai Putri Melayu	Jembatan 2	
12	Pantai 3 Putri	Jembatan 3	
13	Pantai Zore	Jembatan 3	
14	Pantai Air Nanti	Jembatan 4	
15	Pantai Elyora	Jembatan 6	
16	Larantuka Pantai	Jembatan 6	
17	Tegar Bahari	Jembatan 6	
18	Reviola	Jembatan 6	
19	Veranta	Jembatan 6	
20	Pantai Tegar Putri	Kec. Galang	
21	Pantai Cakang	Kec. Galang	
22	Pantai Kalat	Kec. Galang	
23	Pantai Glory Melur	Kec. Galang	
24	Pantai Kirana	Kec. Galang	
KEC. BELAKANG PADANG			
1	Melawa	Kel. Sekanakraya	
2	Pantai Pasir Putih	Kel. Sekanakraya	
KEC. SEKUPANG			
1	Pantai Tanjung Pinggir	Kel. Tanjungpinggir	
2	Pantai Tanjung Datuk	Kel. Tanjungpinggir	
3	Marina Waterfront	Kel. Tanjungriau	
4	Pantai Dangas	Kel. Tanjungpinggir	
5	Pantai Cipta Land	Jl. Tiban Utara, Patam Lestari	
6	Pantai Wisata Marina City	Kel. Tanjungriau Kec. Sekupang	
7	Pantai Wisata Tanjung Pinggir	Kel. Tanjungpinggir, Kec. Sekupang	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. LUBUK BAJA			
1	Pantai Tanjung Uma	Tj. Uma	
KEC. SEI BEDUK			
1	Pantai Tanjung Piayu	Jl. S. Parman, Tj. Piayu	
KEC. BATAM KOTA			
1	Mega Wisata Ocarina	Kel. Belian	
2	Pantai Cafe	Kel. Tj. Uma	
KEC. BATU AMPAR			
1	Pantai Stres	Kec. Batu Ampar	
KEC. BENGKONG			
1	Pantai Tanjung Buntung	Kel. Bengkong laut	
2	Golden Beach	Kel. Bengkong laut	
KEC. BULANG			
1	Pantai Setokok	Kel. Setokok	
2	Pantai Gelam	Kel. Pantai Gelam	
TOTAL WISATA PANTAI			**59**

Tabel 2.4 Daftar Wisata (Agro & Eco) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Mangrove Pandang Tak Jemu	Kampung Tua Bakau Serip Pantai,	
2	Pantai Bale-Bale	Jalan Hang Lekiu KM. 4, Tua Bakau Serip Pantai, Sambau	
3	Kebun Raya Batam	Kel. Sambau	
4	Kampung Wisata kelembak	Kampung Kelembak Sambau	
5	Desa Wisata Kampung Teri	Kampung Tua Teri Jalan Ketapang Sambau	
6	Wisata Alam AVJ Mangrove	Kel. Batu Besar	
KEC. BATU AJI			

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. SAGULUNG			
1	Citra Kebun Wisata	Kel. Sungai Lekop	
KEC. GALANG			
1	Agro Wisata Sri Purnama	Sembulang Pasir Merah Kel Sembulang	
2	Agro Wisata Buah Naga	Pulau Rempang	
3	Agro Piknik Barelang	Rempang Cate	
KEC. BELAKANG PADANG			
KEC. SEKUPANG			
1	Agro Wisata Jambu Marina	Kel. Tg. Riau Sekupang	
2	Hutan Wisata Mata Kucing	Jl. Taman Bukit Golf, Tj. Riau, Kibing	
3	Kampung Sawah by Jambu Madu Edufarm	Kel. Tg. Riau Sekupang	
4	Agro Piknik Marina	Tanjung Riau Sekupang	
5	Tebing Langit Bukit Dangas	Tg Pinggir	
6	Taman Kelinci	Tj Pinggir	
7	Taman Rusa	Tj Pinggir	
KEC. LUBUK BAJA			
KEC. SEI BEDUK			
1	Agrowisata Pulau Sari Dua	Duriangkang	
2	Agrowisata Rimbun Bersahabat	Mangsang	
KEC. BATAM KOTA			
1	Eco Edu Park	Jalan Taman Golf Sukajadi No 113-127 Sukajadi	
2	Panbil Nature Reserve	Jalan Ahmad Yani Muka Kuning	
KEC. BATU AMPAR			
KEC. BENGKONG			
1	Taman Dino	Bengkong Laut Golden City	
2	Mega Wisata Ocarina Batam	Sadai	
KEC. BULANG			
1	Agro Mulyo Eco Adventures	Pulau Setokok	
TOTAL AGRO DAN EKO WISATA			**24**

Tabel 2.5 Daftar Wisata (Religi) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Masjid Tanjak Bandara	Tugu Rajawali Batu Besar	
KEC. BATU AJI			
1	Masjid Sultan Mahmud Riayatsyah	Kel. Tanjung Uncang	
KEC. SAGULUNG			
KEC. GALANG			
1	Vihara Quan Am Tu	Ex Camp Vietnam, Sijantung	
2	Vihara Mulia Dharma	Sembulang	
3	Guan Yin	Sijantung	
4	Immaculate Conception Mary Church	Ex Camp Vietnam, Sijantung	
5	Jalan Salib	Ex Camp Vietnam, Sijantung	
KEC. BELAKANG PADANG			
1	Pulau Tulub (makam Sunan Tulub	Pulau Senang, Kel. Sekanak Raya	
KEC. SEKUPANG			
1	Mesjid Raya Baiturrahman	Kampung Agas	
2	Vihara Duta Mahayana	Kec. Sekupang	
3	Patung Dewi Kwan Im	Tanjung Pinggir	
4	Pura Agung Amertha Buana	Kec. Sekupang	
5	Vihara Samudra Dharma	Kec. Sekupang	
6	Kwam Im Temple	Tanjung Pinggir	
KEC. LUBUK BAJA			
1	Lalitha Tample	Kec. Lubuk Baja	
2	Kelenteng Cetya Tridarma	Kec. Lubuk Baja	
3	Gereja HKBP Lubuk Baja	Kec. Lubuk Baja	
4	Gereja Khatolik Santo Petrus	Kec. Lubuk Baja	
5	Masjid Jabal Arafah	Jl. Imam Bondjol	
6	Vihara Tua Pek Kong	Jl. Pembangunan	
7	Vihara Budi Bhakti	Jl. Pembangunan	
KEC. SEI BEDUK			
KEC. BATAM KOTA			
1	Mesjid Raya Agung Batam Centre	Kec. Batam Kota	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Vihara Maha Duta Meitareya Monastery	Kec. Batam Kota	
3	Gereja Tabga Batam Centre	Kec. Batam Kota	
KEC. BATU AMPAR			
1	Mesjid Baitusyakur	Kec. Batu Ampar	
2	GPIB Imanuel	Kec. Batu Ampar	
3	Masjid Al-Mardhotillah	Jl. Duyung blok A no.1, Sungai Jodoh	
4	Masjid Baitul Makmur	Kp. Seraya	
KEC. BENGKONG			
1	Masjid Ceng Ho	Kec. Bengkong	
2	Masjid Jami' Nurul Iman	Bengkong Harapan I RW 6	
KEC. BULANG			
1	Vipassana Dhura Hermitage	Jembatan 3 Barelang, Pulau Setokok	
TOTAL WISATA RELIGI			**31**

Tabel 2.6 Daftar Wisata (Sejarah) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Makam Zuriat Raja Nong Isa	Pantai Nongsa Kel. Sambau	
2	Objek Wisata Rumah Melayu Limas Potong	Kamp. Melayu, Kel. Batu Besar	
3	Makam Syekh Maulana Qurtubhi At Tharini	Sambau	
KEC. BATU AJI			
1	Cerobong Asap Pabrik Batu Bata Batam Brick Works	Tanjung Uncang	
KEC. SAGULUNG			
1	Makam Syekh Abdurrahman	Sungai Lekop Sagulung	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. GALANG			
1	Ex Camp Vietnam Refugee	Pulau galang batam kepulauan Riau, Sijantung	
2	Minamisebo (Tugu Jepang)	Kel. Sembulang,	
3	Pulau Air Raja	Kel. Air Raja	
4	Komplek Makam Putri Dahlia	Subang Mas	
KEC. BELAKANG PADANG			
1	Kota Tua Pulau Sambu	Kec. Belakang Padang	
2	Markas Komando Korps Operasi (KKO)	Kec. Belakang Padang	
3	Makan Sunan Tulub	Pulau Senang	
KEC. SEKUPANG			
1	Makam Ratu Syarifah Sun Isarroh Binti Maulana Ishaq	Tiban Indah Sekupang	
KEC. LUBUK BAJA			
KEC. SEI BEDUK			
KEC. BATAM KOTA			
1	Museum Raja Ali Haji	Dataran Engku Putri, Batam Centre	
KEC. BATU AMPAR			
KEC. BENGKONG			
1	Makam Waliyulloh Syaikhotina Aisyah Nong Isa	Jl Sakura Tj Buntung	
KEC. BULANG			
1	Makam Tumenggung Abdul Jamal	Bulang Lintang	
TOTAL WISATA SEJARAH			**16**

Tabel 2.7 Daftar Wisata (Budaya) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Rumah Limas Potong	Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam	
2	Makam Nong Isa	Pantai Nongsa Kel. Sambau, Kec. Nongsa Kota Batam	
KEC. BATU AJI			
KEC. SAGULUNG			
KEC. GALANG			
KEC. BELAKANG PADANG			
KEC. SEKUPANG			
KEC. LUBUK BAJA			
KEC. SEI BEDUK			
KEC. BATAM KOTA			
1	Lembaga Adat Melayu	Gedung Lam, Jln. Nong Isa, Batam Centre, Kel. Belian	
KEC. BATU AMPAR			
KEC. BENGKONG			
KEC. BULANG			
1	Makam Tumenggung Abdul Jamal	Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam	
TOTAL WISATA BUDAYA			**4**

Tabel 2.8 Daftar Wisata (Olahraga) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	The Bay Golf Club	Kel. Sambau	
2	Palm Spring Golf & Resort	Kel. Sambau	
3	Tamarine Golf	Kel. Sambau	
4	Santana Golf	Kel. Sambau	
5	Out Bound Tour Nongsa Point Marina	Kec. Nongsa	
6	Drak Bike Park	Kabil	
7	Shimano Cycling Track	Kabil	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
8	Cabana Club	Jl. Hang Lekiu, Sambau	
KEC. BATU AJI			
1	GOR Badminthon Batuaji	Kec. Batuaji	
2	GOR Badminthon Batuaji	Kec. Batuaji	
KEC. SAGULUNG			
1	Waterpark Tembesi	Komp. TOP 100 Tembesi	
2	Jet Ski Safari Batam	Tembesi	
KEC. GALANG			
KEC. BELAKANG PADANG			
KEC. SEKUPANG			
1	Soutlink Golf & Country Club	Kel. Tiban Kampung	
2	Batam Hill Golf & Resort	Kel. Tanjungpinggir	
3	GOR Badminthon Tiban	Kec. Sekupang	
4	Futsal Tiban Lama	Kec. Sekupang	
5	Out Bound Tour Marina City	Kec. Sekupang	
6	Flying Fox Marina City	Kec. Sekupang	
7	Go Cart Marina City	Kec. Sekupang	
8	Sei. Ladi Hiking Track	Dekat Kampung Tiban Lama	
9	DANGAS BIKEPARK	Tj. Pinggir	
10	Batam Cable-Ski	Waterfront City Resort, Tj. Riau	
KEC. LUBUK BAJA			
1	Bowling Hokki Bear BCS Mall	Kec. Lubuk Baja	
2	THRIVE POOL and Futsal	Baloi	
3	Two Nine Club Billyard	Nagoya Hill Mall	
KEC. SEI BEDUK			
1	Bumi Perkemahan Pramuka	Kec. Sei Beduk	
2	Bowling Hokki Bear TOP 100 Tembesi	Kec. Sei Beduk	
KEC. BATAM KOTA			
1	Stadion Tumenggung Abdul Jamal	Kel. Sukajadi	
2	Indoor Tumenggung Abdul Jamal	Kel. Sukajadi	
3	The Central Sukajadi Golf	Kel. Sukajadi	
4	GOR Badminthon CBN Hang Nadim	Kel. Teluk Tering	
5	GOR Badminthon Orchid	Kel. Baloi Permai	
6	GOR Badminthon Sukajadi	Kec. Batam Kota	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Futsal Ikan Daun	Kec. Batam Kota	
8	Ricky Yang Pool and Cafe	Mega Mall	
9	Ricky Yang Pool and Cafe	Kepri Mall	
10	Nine Ball Pool	Ruko Sukajadi	
11	Alun-alun Dataran Engku Puteri	Kec. Batam Kota	
KEC. BATU AMPAR			
1	Q – POOL and Cafe	Hotel Planet Holiday	
2	Pitstop and Entertaiment	Hourborbay Mall	
3	Fashion Pool and Cafe	Avava Plaza	
KEC. BENGKONG			
1	Out Bound Tour Golden Prawn	Kec. Bengkong	
2	Go Cart Golden Prawn	Kec. Bengkong	
3	Waterboom	Bengkong Laut	
4	Monkey Beach Hut Sea Sport Centre	Tj. Buntung	
KEC. BULANG			
1	Barelang Fishing Pond	Jl. Transbalerang Jembatan IV P. Setokok	
TOTAL WISATA OLAHRAGA			**46**

Tabel 2.9 Daftar Wisata Pelabuhan/Dermaga Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Pelabuhan Ferry Internasional Nongsa Pura	Kec. Nongsa	
2	Pelabuhan Domestik Telaga Punggur	Kec. Nongsa	
3	Bandara Internasional Hang Nadim	Kec. Nongsa	
KEC. BATU AJI			
KEC. SAGULUNG			
1	Pelabuhan Rakyat Sagulung	Kec. Sagulung	
KEC. GALANG			
1	Pelabuhan Hasyim	Kec. Galang	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. BELAKANG PADANG			
1	Pelabuhan Rakyat Belakang padang	Kec. Belakangpadang	
KEC. SEKUPANG			
1	Pelabuhan Tradisional Pancung	Kec. Sekupang	
2	Pelabuhan Domestik Sekupang	Kec. Sekupang	
3	Pelabuhan Beton Sekupang	Kec. Sekupang	
4	Sekupang Ferry Terminal		
5	Pelabuhan Ferry Internasional Teluk Senimba	Kec. Sekupang	
KEC. LUBUK BAJA			
KEC. SEI BEDUK			
KEC. BATAM KOTA			
1	Batam Centre Ferry Terminal	Kec. Batam Kota	
KEC. BATU AMPAR			
1	Pelabuhan Khusus Ferry International Harbour Bay	Kec. Batu Ampar	
2	Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar	Kec. Batu Ampar	
KEC. BENGKONG			
1	Pelabuhan Pancung Cheng Ho	Tanjung Buntung	
KEC. BULANG			
TOTAL PELABUHAN DAN DERMAGA			**15**

Tabel 2.10 Daftar Wisata (Buatan) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Nuvasa Bay	Kelurahan Sambau	
2	Kampung Terih	Kampung Tua Kp. Terih, Kel.	

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
		Sambau	
KEC. BATU AJI			
KEC. SAGULUNG			
1	Dendang Melayu	Jembatan satu barelang kec., Jl. Trans Barelang, Pulau Setokok	
KEC. GALANG			
KEC. BELAKANG PADANG			
1	Elang-elang Laut	Kel. Tanjungsari Kec. Blk. Padang	
KEC. SEKUPANG			
1	Tebing Langit	Jalan Ir. Sutami, Tanjung Pinggir, Sekupang, Tj. Pinggir	
2	Puncak Beliung	Kel. Tanjung Riau	
3	Taman Rusa	Kel. Tanjung Pinggir	
4	Taman Kolam	Kel. Tanjung Pinggir	
5	Batam Forest Top	Kel. Tanjung Pinggir	
6	Tangga Seribu	Kel. Kibing	
KEC. LUBUK BAJA			
KEC. SEI BEDUK			
KEC. BATAM KOTA			
1	Welcome to Batam Bukit Clara	Teluk Tering, Kota Batam	
2	Dataran Engku Putri	Jalan Engku Putri, Tlk. Tering	
3	Dataran Engku Hamidah	Kel. Taman Baloi	
4	Dang Anom	Kel. Taman Baloi	
KEC. BATU AMPAR			
KEC. BENGKONG			
1	Golden City Bengkong	Bengkong Laut	
2	Coastarina	Tanjung Buntung	
3	Dino's Gate	Bengkong Laut	
4	Miniature House Indonesia	Tanjung Buntung	
KEC. BULANG			
TOTAL WISATA BUATAN			**18**

Tabel 2.11 Daftar Wisata (Jembatan) Batam Per Kecamatan

NO	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KETERANGAN

1	2	3	4
KEC. NONGSA			
1	Nongsa Pura Bridge	Jl. Hang Lekiu, Sambau	
KEC. BATU AJI			
KEC. SAGULUNG			
1	Tengku Fisabilillah	Kel. Tembesi Kec. Sagulung	
2	Nara Singa II	Kel. Setokok Kec. Bulang	
3	Raja Ali Haji	Kel. Rempangcate Kec. Galang	
4	Sultan Mahmud Abidin	Kel. Rempangcate Kec. Galang	
5	Tuanku Tambusai	Kel. Galang Baru Kec. Galang	
6	Raja Kecik	Kel. Galang Baru Kec. Galang	
KEC. GALANG			
KEC. BELAKANG PADANG			
KEC. SEKUPANG			
KEC. LUBUK BAJA			
KEC. SEI BEDUK			
KEC. BATAM KOTA			
KEC. BATU AMPAR			
KEC. BENGKONG			
KEC. BULANG			
TOTAL WISATA JEMBATAN			**7**

Secara geografis, Kota Batam memiliki letak yang strategis di wilayah Kepulauan Riau dan dikelilingi oleh sejumlah wilayah penting. Di sebelah utara, Kota Batam berbatasan dengan Selat Singapura, yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun. Adapun di sebelah timur, Kota Batam berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Letak geografis ini menjadikan Kota Batam sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, perdagangan, maupun transportasi.

Sebagai kota strategis yang terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia, Kota Batam memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata. Kekayaan budaya lokal yang heterogen, warisan sejarah, serta beragam daya tarik wisata buatan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perencanaan yang terarah, terpadu, dan partisipatif menjadi sangat penting guna memaksimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mengantisipasi tantangan global maupun regional. Letak geografis yang strategis dan tingkat aksesibilitas yang tinggi menjadikan Batam sebagai destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Destinasi wisata unggulan yang ditawarkan mencakup wisata bahari, wisata belanja, wisata religi, wisata olahraga, wisata sejarah, wisata minat khusus, wisata ekowisata dan agrowisata, wisata budaya, wisata kuliner, hingga wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Selain itu, Batam juga memiliki potensi seni dan budaya lokal yang kaya, seperti seni tari, musik tradisional, dan kerajinan tangan, yang berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Kota Batam diharapkan mampu semakin memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan, industri, jasa, alih kapal, dan pariwisata yang maju, ramah terhadap investasi, serta memiliki daya saing di tingkat regional maupun internasional. Pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Misi ke-1 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, yakni Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global serta Misi ke-5 Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang terarah, efektif, dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (RENSTRA) Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam merupakan dokumen publik yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di bidang Kebudayaan, Kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kota Batam untuk periode lima tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor kebudayaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif di daerah. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis, terukur dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, serta arah kebijakan pembangunan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan operasional tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran

pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu mengarahkan seluruh sumber daya secara optimal, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sektor kebudayaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif di Kota Batam.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Renstra Kota Batam tentang RPJMD 2025–2029. Selain itu, dokumen ini juga mempertimbangkan isu-isu strategis, aspirasi masyarakat, serta perkembangan tren pariwisata dan kebudayaan di tingkat nasional maupun internasional.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1379), tugas pokok dari Disbudpar Kota Batam adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

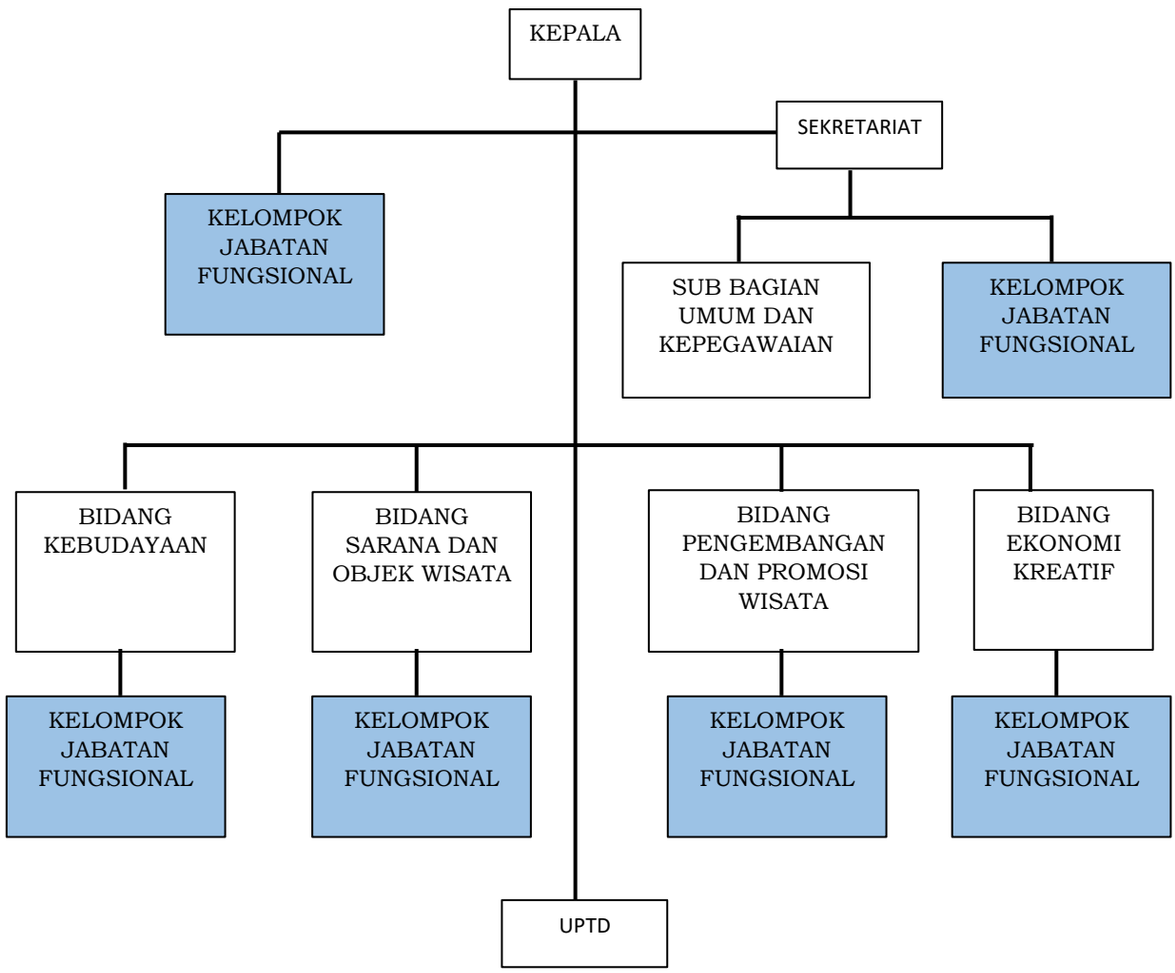
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata dan bidang ekonomi kreatif;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata dan bidang ekonomi kreatif;
c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata dan bidang ekonomi krcatif; dan
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.

A. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Disbudpar telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Disbudpar



B. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Disbudpar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1379), uraian tugas jabatan struktural Disbudpar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata dan bidang ekonomi kreatif;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata dan bidang ekonomi kreatif;
c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata dan bidang ekonomi kreatif; dan
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.

Uraian Tugas:

a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan prograan dan kegiatan, scrta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Sarana, Dan Obyek Wisata, Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, Bidang Ekonomi Kreatif, UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan

sasaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;

f. menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi, dan Rencana Kerja, serta rencana kcrja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan kesehatan berdasarkan ketenluan peraturan perundang-undangan;
j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
k. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Behan Kerja di lingkup Dinas;
l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas- tugas kedinasan oleh para Kepala Bidang;
o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
p. menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pembantu Bendahara

Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;

q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerinlah daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
r. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang sarana dan obyek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata, dan bidang ekonomi kreatif sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Tugas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

Fungsi

a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta urusan dokumentasi dan informasi;
e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
f. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan Unit Pelaksana Teknis; dan
g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Uraian Tugas

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Dinas;

d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas- tugas di Bidang;

e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

f. menyelenggarakan pengoorclinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol, dan hubungan masyarakat;

g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;

j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;

k. mengoordinasikan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;

l. mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup Dinas;

m. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;

n. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;

o. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;

p. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;

q. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;

r. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;

s. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan pcnelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

u. mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;

v. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;

w. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan;

x. mengoordinasikan mengoordinasikan pembuatan Pohon Kinerja (Logical Framework) dan penyusunan Peta Proses Bisnis (Business Process) Dinas;

y. mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

z. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan lingkup dinas;

aa. mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;

bb. mengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan, dan penyajian arsip menjadi informasi bidang kesehatan masyarakat;

cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

dd. memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;

ee. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

ff. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebija.kan kesekretariatan;

gg. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

hh. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretarialan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

ii. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian Tugas

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;

f. memproses penerimaan, pengiriman surat-surat, dokumentasi, serta kearsipan;

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas, dan rapat-rapat di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor.

j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;

k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

l. melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pemikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai un tuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas;

n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan, dan pengembangan karier, serta disiplin pegawai;

o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai, dan daftar urut kepangkatan;

p. melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Dinas;

q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;

r. melaksanakan sosialisasi/intemalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;

s. menyusun Peta Proses Bisnis, SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

t. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kcpegawaian di lingkungan Dinas;

v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

w. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data, serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan

y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Kebudayaan

Tugas

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kebudayaan.

Fungsi

a. penyusunan dan program lingkup rencana kebudayaan;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kebudayaan;

c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup kebudayaan; dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup kebudayaan.

Uraian Tugas

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Kebudayaan yang berbasis kincrja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Kebudayaan;

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Kebudayaan;

d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. melaksanakan penggalian, pelestarian, pengembangan, dan evaluasi kegiatan di Bidang Kebudayaan;

f. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan pada pelaku, penggiat, dan organisasi kebudayaan sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, serta penggiat organisasi kebudayaan di Daerah;

g. memberikan apresiasi kepada pelaku, penggiat, dan organisasi kebudayaan sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat, dan organisasi kebudayaan di Daerah;

h. mengusulkan potensi khazanah kesenian dan kebudayaan (benda dan tak benda) serta pelaku, penggiat, dan organisasi kebudayaan untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pemerintahan Pusat, dan Pemerintahan Daerah, atau lembaga terkait lainnya;

i. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pemberian izin kegiatan kesenian dan kebudayaan di Daerah.

j. mengoordinasikan pelaksanaan penggalian, pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi di Daerah;

k. mengoordinasikan pelaksanaan penggalian, pelestarian, dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah;

l. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan pelaku, penggiat, dan organisasi adat dan tradisi yang ada di Daerah;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku, penggiat, dan organisasi Adat dan Tradisi sebagai mitra dalam pengembangan kebudayan di Daerah;

n. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, dan organisasi adat dan tradisi yang berprestasi, serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebudayaan di Daerah;

o. mengoordinasikan pelaksanaan penggalian, pelestarian, dan pengembangan berbagai cabang seni (musik, tari, sastra, teater, dan seni rupa) yang ada di Daerah;

p. mengoordinasikan pelaksanaan penggalian, pelestarian, dan pengembangan berbagai cabang seni unggulan yang dapat menjadi identitas dan ikon Daerah;

q. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan pelaku, penggiat, dan organisasi kesenian berbagai cabang seni (musik, tari, sastra, teater, dan seni rupa) yang ada di Daerah;

r. mengoordinasik.an pelaksanaan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, dan organisasi kesenian yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelestarian dan pengembangan seni di Daerah;

s. mengoordinasikan pelaksanaan penggalian, penulisan dan pendokumentasian sejarah di Daerah.

t. mengoordinasikan pelaksanaan penggalian, pendataan dan pengelolaan situs cagar budaya dan benda cagar budaya di Daerah.

u. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam urusan penemuan benda cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Daerah;

v. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan anggota masyarakat dan lembaga atau oeganisasi yang memiliki, menyimpan dan mengetahui cagar budaya dan benda cagar budaya dalam upaya pendataan, pengumpulan;

w. mengoordinasikan pelaksanaan pengusulan dan pengelolaan cagar budaya dan benda cagar budaya;

x. mengoordinasikan pelaksanaan kajian terhadap situs dan benda yang diduga atau patut diduga sebagai cagar budaya dan cagar budaya yang selanjutnya di usulkan kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah

Provinsi untuk diakui sebagai cagar budaya dan benda cagar budaya di Daerah;

y. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan pelaku, tokoh, penulis, dan organisasi kesejarahan yang ada di Daerah;

z. mengoordinasikan pelaksanaan urusan dan pelayanan dan permuseuman di Daerah;

aa. mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Urusan Sejarah, Cagar Budaya, dan Permuseuman yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat;

bb. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum Urusan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan perizinan atas kegiatan kesejarahan, cagar budaya dan permuseuman di Daerah yang dilaksanakan oleh yang bukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;

cc. mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian kegiatan bidang kebudayaan yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat;

dd. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;

ee. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;

ff. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Kebudayaan;

gg. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

hh. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Kebudayaan; dan

ii. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

4. Bidang Sarana dan Objek Wisata

Tugas

Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Sarana dan Objek Wisata.

Fungsi

a. penyusunan rencana dan program lingkup sarana dan objek wisata;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup sarana dan objek wisata;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup sarana dan objek wisata; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada Bidang Sarana dan Objek Wisata.

Uraian Tugas

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Bidang Sarana dan Objek Wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Sarana dan Objek Wisata;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Sarana dan Objek Wisata.
d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. merumuskan draft usulan kegiatan dan kerangka acuan pengembangan kewilayahan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
f. merumuskan penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di bidang sarana wisata, objek wisata, dan daya tarik wisata Daerah;
g. mengembangkan rumusan Lansekap Objek Wisata, Destinasi Wisata Buatan, Daya Tarik Wisata Baru serta pelestarian kesejarahan Objek, dan daya tarik wisata sesuai dengan standar kepariwisataan;
h. melaksanakan koordinasi semua kegiatan, kebijakan, serta program Pemerintah Daerah dalam bidang Sarana dan Objek Wisata dengan stakeholders kepariwisataan dalam bentuk Surat Edaran, Surat Pemberitahuan, serta sarana komunikasi lainnya;

i. melaksanakan koordinasi, pembinaan pengawasan, dan pengendalian, serta pengaturan pengelolaan sarana dan objek wisata dengan para pelaku usaha kepariwisataan;
j. merumuskan struktur dan tabulasi data dan informasi usaha kepariwisataan kepada semua pihak yang berkepentingan;
k. melaksanakan fasilitasi dan membangun kerjasam.a dengan Asosiasi Usaha Kepariwisataan dan komunitas lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap isu dan permasalahan kepariwisataan;
l. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Usaha Urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk pelaksanaan Sertifikasi Usaha dalam berbagai urusan usaha kebudayaan dan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standardisasi dan kompetensi;
m. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi khusus untuk tenaga kerja urusan kebudayaan dan pariwisata untuk pelaksanaan Sertifikasi Profesi atau Uji Kompetensi dalam berbagai urusan kebudayaan dan pariwisata;
n. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pariwisata yang menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan penghargaan dalam berbagai tingkatan;
o. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan memberikan penyuluhan serta pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata, Satuan Pramuka Pariwisata, Sapta Pesona, Masyarakat Destinasi Pariwisata, dan kelompok lainnya secara berjenjang;
p. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan pengelolaan sarana wisata sehingga para pelaku usaha patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan usaha Kepariwisataan secara berkala terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Sertifi.kasi Usaha;
r. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan para pekerja Usaha Kepariwisataan secara berkala terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Sertifikasi Profesi;
s. mengoordinasikan rancangan sistem pemberdayaan dan standarisasi kebudayaan dan pariwisata secara berdayaguna dan berhasil guna;
t. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

u. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
v. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Sarana dan Objek Wisata;
w. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Sarana dan Objek Wisata; dan
y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kepala bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

5. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata

Tugas

Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata.

Fungsi

a. penyusunan program dan rencana lingkup pengembangan dan promosi wisata;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengembangan dan promosi wisata;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup pengembangan dan promosi wisata; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan dan promosi wisata.

Uraian Tugas

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata;
d. menjelaskan, membirnbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. mengoordinasikaan semua kegiatan, kebijakan serta program Pcmerintah Daerah dalam bidang Pengembangan dan Promosi Wisata dengan para pelaku Pariwisata untuk pencapaian target kunjungan wisatawan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan dan penyiapan bahan penyelenggaraan Informasi Kepariwisataan berupa percetakan brosur-brosur tentang Informasi Pariwisata di Daerah;
g. mengoordinasikan perumusan dan mempromosikan rencana Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pameran di Daerah maupun Luar Daerah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi data kepariwisataan yang akan diperbaharui ke laman situs;
i. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Program Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata;
j. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi hubungan antar pelaku usaha, instansi, dan lembaga kepariwisataan dalam promosi dan pengembangan pariwisata;
k. mengoordinasikan pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Bimbingan Teknis terhadap Lembaga Kepariwisataan;
l. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan promosi pariwisata Daerah;
m. mengoordinasikan pelaksanaan promosi pariwisata;
n. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan evaluasi kegiatan promosi dan kegiatan-kegiatan di Bidang Promosi Wisata;
o. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan di Bidang Promosi Wisata;

p. mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan dan penyiapan bahan penyelenggaraan Informasi Kepariwisataan berupa percetakan brosur-brosur tentang informasi pariwisata di Daerah;
q. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengar1 instansi terkait dalam rangka pengambangan promosi pariwisata melalui media informasi dan teknologi kepariwisataan;
r. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan dan sosialisasi kebijakan bidang pengembangan promosi pariwisata melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
s. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi serta pengumpulan data destinasi dan objek wisata sebagai bahan promosi kepariwisataan;
t. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap media Informasi dan teknologi yang berhubungan dengan pariwisata;
u. mengoordinasikan pelaksanaan publikasi dalam pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi;
v. mengoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
w. mengoordinasikan pelaksanaan melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, dan penyusunan naskah bahan terjemahan;
x. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
y. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan.
z. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup pengembangan dan promosi wisata;
aa. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
bb. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata; dan
cc. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

Tugas

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Ekonomi Kreatif.

Fungsi

a. penyusunan program dan rencana lingkup ekonomi kreatif;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup ekonomi kreatif;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup ekonomi kreatif; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi kreatif.

Uraian Tugas

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Ekonomi Kreatif yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Ekonomi Kreatif;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja ekonomi kreatif;
d. melaksanakan koordinasi, singkronisasi, dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif di Daerah dengan pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif yang meliputi bidang aplikasi dan pengembang perangkat lunak permainan digital (game developery, desain interior, desain grafts, komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penertiban, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, telcvisi, dan radio;
e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada pelaku, penggiat usaha, dan organisasi ekonomi kreatif sebagai

upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif di Daerah;

f. melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku, penggiat usaha, dan organisasi ekonomi krcatif dari daerah lain dan nasional yang melaksanakan kegiatan di Daerah;
g. memberikan informasi berbagai kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang ekonomi kreatif kepada pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif serta masyarakat;
h. memberikan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di Dacrah;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di Bidang Ekonomi Kreatif;
j. melaksanakan pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pendaftaran usaha rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif di Daerah;
k. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya {yang meliputi seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, seni kriya, kllliner, dan fesyen);
l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi krealif berbasis seni dan budaya sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
n. mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pendaftaran atas kegiatan dan usaha ekonomi kreatif, berbasis seni dan budaya di Daerah yang dilaksanakan oleh yang bukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
o. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif berbasis media (televisi dan radio), desain (desain interior, desain komunikasi visual, dan desain produk)

serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (aplikasi dan game depelover, film, animasi, video, fotografi, dan periklanan);

p. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan llmu Pengetahuan dan Teknologi;
q. mengoordinasikan pelaksanaan pcnilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalarn pengembangan ekonomi krcatif berbasis media, desain, dan llmu Pengetahuan dan Teknologi;
r. mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Dcsain dan llmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat;
s. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum Urusan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain, dan llmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pendaftaran usaha dan rekomendasi atas kegiatan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi budaya di Daerah yang dilaksanakan oleh yang bukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
t. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif (meliputi aplikasi dan game developer, desain grafis, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio);
u. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif di Daerah dengan pelaku, penggiat, usaha, dan organisasi ekonomi kreatif dari Daerah lain dan nasional;
v. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam upaya memajukan ekonomi kreatif di Daerah;
w. mengoorctinasikan pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Urusan Fasilitasi Ekonomi Kreatif yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat;

x. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
y. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
z. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Ekonomi Kreatif;
aa. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
bb. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Ekonomi Kreatif; dan
cc. melaksanakan tugas lain dan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari ASN dalam jenjang:

a. Jabatan Fungsional Ahli Madya yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; dan
b. Jabatan Fungsional Ahli Muda berjenjang hingga kebawahnya sesuai struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang selaku Koordinator.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Batam Raja Ali Haji.

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya pengelolaan Museum Batam Raja Ali Haji.

Fungsi

a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
b. pelaksanaan pengelolaan, teknis operasional dan pemeliharaan Museum Batam Raja Ali Haji;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan masyarakat di Museum Batam Raja Ali Haji;
d. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi terkait pemanfaatan sarana dan prasarana Museum Batam Raja Ali Haji;
e. melakukan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pelestarian benda koleksi museum;
f. memberikan bimbingan edukatif kultural serta publikasi penyajian rekreatif benda-benda yang memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan dan pengembangan museum;
g. pelaksanaan pemungutan tarif masuk museum setelah UPTD-BLUD dan peraturan ketentuan biaya masuk museum ditetapkan.
h. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD;
i. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.penyusunan program dan rencana lingkup ekonomi kreatif;

Uraian Tugas

a. Kepala UPTD
    1. melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan pelayanan museum.
    2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
        a. merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional UPTD sesuai bidang tugas jabatannya yang menjadi kewenangannya;
c. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi umum untuk mendukung kegiatan di UPTD;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan museum kepada masyarakat;
e. mengelola kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam rangka manajemen pendayagunaan sumber daya secara optimal;
f. mendistribusikan tugas kepada kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membimbing kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
h. memeriksa hasil kerja kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya yang menjadi kewenangannya;
j. melaporkan pelaksanaan tugas ke Dinas sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan berdasarkan bidang tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan tata usaha yang menjadi tanggung jawab UPTD Museum Batam Raja Ali Haji.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan perencanaan program dan kegiatan;
   b. penyiapan kebijakan operasional dan teknis UPTD;
   c. penyiapan bahan urusan keuangan, rumah tangga kantor, asset perlengkapan dan peralatan kantor;
   d. penyiapan administrasi kepegawaian;
   e. penyiapan administrasi umum;

f. penyiapan bahan dan aturan manajemen pendayagunaan sumber daya;
g. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor;
h. penyiapan bahan system informasi dan profil;
i. penyiapan laporan pelaksanaan tugas secara berkala;dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan berdasarkan bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD
    1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
    2. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD
    1. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan klasifikasi jabatan yang ditetapkan berdasarkan tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
    2. Jumlah jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta perencanaan dan kebutuhan UPTD.
    3. Nomenklatur jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Disbudpar

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data per Bulan September 2025, jumlah pegawai Disbudpar Kota Batam sebanyak 71 orang yang terdiri dari 40 Orang PNS, 14 Orang PPPK dan 17 Orang Non ASN. Jika dikelompokan menurut jenis kelamin terdiri atas 28 orang perempuan dan 43 orang laki-laki.

Secara lebih jelas kondisi sumber daya manusia di Disbudpar Kota Batam berdasarkan golongan ruang tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12 Data Pegawai Disbudpar Kota Batam Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non-Gol
1.	**Kepala**													
	Kepala Dinas											1		
2.	**Sekretariat**													
	Sekretaris Dinas									1				
	Kasubbag/struktural								1					
	Jabatan Fungsional PNS							1	1					
	Fungsional Umum/ Pelaksana					2	3							
	Jabatan Fungsional PPPK													2
	Non ASN													3
3.	**Bidang Kebudayaan**													
	Kepala Bidang Kebudayaan									1				
	Ka. Museum								1					
	Ka. TU/struktural							1						
	Jabatan							1	2					

No.	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non-Gol
	Fungsional PNS													
	Fungsional Umum/ Pelaksana		1			3	1	1	1					
	Jabatan Fungsional PPPK													1
	Non ASN													8
4.	**Bidang SOW**													
	Kepala Bidang Sarana Objek Wisata							1						
	Jabatan Fungsional PNS							1	1					
	Fungsional Umum/Pelaksana	1						1	1					
	Jabatan Fungsional PPPK													6
	Non ASN													1
5.	**Bidang PPW**													
	Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi									1				
	Jabatan Fungsional PNS								2					
	Fungsional Umum/ Pelaksana								2					
	Jabatan Fungsional PPPK													3
	Non ASN													
6.	**Bidang Ekraf**													
	Kepala Bidang								1					

No.	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non-Gol
	Ekonomi Kreatif													
	Jabatan Fungsional PNS								2					
	Fungsional Umum/ Pelaksana					1								
	Jabatan Fungsional PPPK													1
	Non ASN													3

Sumber: Disbudpar Kota Batam, September 2025

Sedangkan secara lebih rinci kondisi sumber daya manusia di Disbudpar Kota Batam berdasarkan pendidikan tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13 Data Pegawai Disbudpar Kota Batam berdasarkan Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	PNS			PPPK			Non ASN		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	S-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S-2	1	3	4	0	0	0	0	0	0
3	S-1	12	15	27	2	1	3	2	1	3
4	D-IV	1	0	1	0	0	0	1	0	1
5	D-III	1	4	5	1	1	2	0	0	0
6	D-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	D-I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SLTA KEGURUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SLTA KEJURUAN	1	0	1	0	0	0	4	1	5
10	SLTA	2	0	2	7	0	7	6	2	8

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	PNS			PPPK			Non ASN		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
11	SLTP KEJURUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SD	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	Total	**18**	**22**	**40**	**12**	**2**	**14**	**13**	**4**	**17**

Sumber: Disbudpar Kota Batam, September 2025

Sedangkan secara lebih rinci kondisi sumber daya manusia di Disbudpar Kota Batam berdasarkan jenis kelamin tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Data Pegawai Disbudpar Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin

No	NAMA JABATAN	JUMLAH	PRIA	WANITA
1	Kepala Dinas	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
3	Kepala Bidang	4	3	1
4	Kepala Sub Bagian	1	-	1
5	Kepala UPTD Museum	1	-	1
6	Ka. TU Museum	1	1	-
7	Jabatan Fungsional	11	5	6
8	Jabatan Pelaksana	20	7	13
9	PPPK	14	12	2
10	Non ASN	17	13	4
JUMLAH		**71**	**43**	**28**

Sumber: Disbudpar Kota Batam, Agustus 2025

Berdasarkan data SDM di atas, seluruh jabatan struktural di Disbudpar terisi oleh pejabat struktural. Secara kualitas, berdasarkan jenjang pendidikan, 4 orang S2 (5,63%), 35 orang S1/D4 (49,30%), 7 orang D3 (9,86%), 23 orang SMA sederajat (32,39%) dan 2 orang SD (2,82%). Dengan komposisi jenjang pendidikan tersebut, memberi dampak positif pada pelaksanaan tupoksi Disbudpar. Namun demikian, dengan perkembangan peraturan dan Kebijakan yang sangat dinamis serta tantangan perencanaan pembangunan di Kota Batam, maka kualitas SDM harus selalu meningkat

melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan berkala dan berkelanjutan.

Berdasarkan komposisi pegawai yang ada maka kebutuhan pegawai untuk menunjang pencapaian kinerja Disbudpar Kota Batam belum sesuai beban kerja.

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Disbudpar. Sarana dan prasarana yang tersedia di Disbudpar berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9 Aset Tanah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Sertifikat		Penggunaan	Keterangan
			Letak / Alamat	Luas (M^2)	Tanggal	Nomor		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2002	Jl. Raja Isa No.21 Batam Center	3312	10/11/2020	32.02.12.04.4.00032	Gedung Lembaga Adat Melayu	
2	Tanah Untuk Makam Bersejarah	2021	Sambau Kec. Nongsa	1800			Makam Nong Isa	
3	Tanah Persil Lainnya	2014	Jl. Trans barelang Kelurahan Rempang Kate Kecamatan Galang Kota Batam	26.771			Dendang Melayu	Nomor SK 383 Tahun 2023 06 Oktober 2023
4	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2002	Jl. Ir Sutami kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam	15.585,499			Gedung Beringin	Nomor SK 383 Tahun 2023 06 Oktober 2023

Sumber: Disbudpar Kota Batam 2025

Tabel 2.15 Daftar Aset peralatan dan Mesin Disbudpar Kota Batam

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Station Wagon	KIA/TRAVELLO	Besi	2010	
2	Global Positioning System	Garmin	Metal	2011	
3	Filing Cabinet Besi	Leeco/4 Laci	Besi	2009	
4	Filing Cabinet Besi	Leeco/4 Laci	Besi	2009	
5	Filing Cabinet Besi	Leeco/4 Laci	Besi	2011	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Filing Cabinet Besi	SETARA LION	BESI	2012	
7	Filing Cabinet Besi	SETARA LION	BESI	2012	
8	Filing Cabinet Besi	Leeco/4 Laci	BESI METAL	2013	
9	Filing Cabinet Besi	Leeco/4 Laci	BESI METAL	2013	
10	Brandkas	Kribbow	Besi	2006	
11	Lemari Kaca	Tempah	Kaca	2007	
12	Lemari Kaca	Tempah	Kaca	2007	
13	Lemari Kayu	Tempah	Kayu	2010	
14	Lemari Kayu	Tempah	Kayu	2014	
15	Lemari Kayu	Tempah	Kayu	2010	
16	Lemari Kayu	Tempah	Kayu	2016	
17	Alat Penghancur Kertas	Personal Scedder	MIKA	2013	
18	Papan Nama Instansi	Tempah	Besi	2015	
19	White Board	Tempah	Papan	2010	
20	Meja Rapat	Glorry	Kayu	2010	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
21	Sofa	Tempah	Kayu/Kulit	2015	
22	Sofa	Tempah	Kayu	2006	
23	Sofa	Tempah	Kulit, busa	2012	
24	Sofa	Tempah	BUSA	2013	
25	Sofa	Tempah	BUSA	2013	
26	Partisi	Tempah	Kayu	2013	
27	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	Dapur
28	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	sekre
29	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	ruang Kadis
30	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	Kebudayaan
31	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	
32	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	
33	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	
34	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	
35	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
36	A.C. Split	AC SPLIT 2PK	PLASTIK	2012	
37	A.C. Split	SAMSUNG / AC SPLIT 1,5 PK	FIBER	2012	
38	A.C. Split	SHARP 2PK	MIKA	2013	
39	A.C. Split	SHARP 2PK	MIKA	2013	
40	A.C. Split	SHARP 1PK	MIKA	2013	
41	A.C. Split	SHARP 2PK	MIKA	2013	
42	A.C. Split	SHARP 2PK	MIKA	2013	
43	A.C. Split	SHARP 2PK	MIKA	2013	
44	A.C. Split	SHARP 2PK	MIKA	2013	
45	A.C. Split	LG 2PK	Plastik	2015	
46	Heating Set	Wika	Besi	2006	
47	Televisi	LG/LCD TV 32	Fiber	2004	
48	Televisi	SAMSUNG LED	Fiber	2011	
49	Televisi	LG	Plastik	2015	
50	Televisi	LG	Plastik	2016	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
51	Video Equalizer	INCH EXCITER	Fiber	2011	
52	Sound System	TOA	Besi	2011	
53	Sound System	ADS		2016	
54	P.C Unit	LENOVO H520s I3 PC DESKTOP	MIKA	2013	
55	P.C Unit	LENOVO H520s I3 PC DESKTOP	MIKA	2013	
56	P.C Unit	Lenovo	Plastik	2014	
57	P.C Unit	Lenovo	Plastik	2014	
58	P.C Unit	HP Core i3	Plastik	2015	
59	P.C Unit	HP Core i3	Plastik	2015	
60	P.C Unit	HP Core i3	Plastik	2015	
61	P.C Unit	HP Core i3	Plastik	2015	
62	P.C Unit	HP Core i3	Plastik	2015	
63	P.C Unit	HP Core i3	Plastik	2015	
64	P.C Unit	HP	Pastik	2015	
65	P.C Unit	HP	Plastik	2015	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
66	P.C Unit	Acer/Aspire TC707	Plastik	2016	
67	P.C Unit	Acer/Aspire TC707	Plastik	2016	
68	P.C Unit	Acer/Aspire TC708	Plastik	2016	
69	P.C Unit	Acer/Aspire TC709	Plastik	2016	
70	Lap Top	HP 1000-1431 TU	Plastik	2014	
71	Lap Top	HP	Pastik	2015	
72	Monitor	LG / LED	Plastik	2014	
73	Monitor	LG / LED	Plastik	2014	
74	Monitor	LG / LED	Plastik	2014	
75	Monitor	Lenovo / touchscreen	Plastik	2014	
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma	Plastik	2014	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET	Pastik	2015	
78	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	JET/G410	Fiber	2010	
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET	Pastik	2015	
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET	Pastik	2015	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L220	Pastik	2016	
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L221	Pastik	2016	
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L222	Pastik	2016	
84	Meja Kerja Pejabat Eselon II	11/2 BIRO 180x90x75	KAYU	2013	
85	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11/2 BIRO 180x90x75	KAYU	2013	
86	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11/2 BIRO 180x90x75	KAYU	2013	
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11/2 BIRO 180x90x75	KAYU	2013	
88	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11/2 BIRO 180x90x75	KAYU	2013	
89	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
90	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
91	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
92	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
93	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
94	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
97	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
98	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
99	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
100	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
101	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 BIRO 160x75x75	KAYU	2013	
102	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Modera	Kayu	2007	
103	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Modera	Kayu	2007	
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Modera	Kayu	2007	
105	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Modera	Kayu	2007	
106	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Modera	Kayu	2007	
107	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Modera	Kayu	2007	
108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	MOCERA	Kayu	2008	
109	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	MOCERA	Kayu	2008	
110	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
111	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
112	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
113	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
114	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
115	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
116	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
117	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
118	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
119	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
120	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
121	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
122	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
123	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
124	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
125	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
126	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
127	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
128	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
129	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 BIRO 120x75x75	MIKA	2013	
130	Meja Tamu Biasa	Plywood	Plywood, Finishing Formica	2012	
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	safari	Kayu/Kulit	2015	
132	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	safari	BUSA	2013	
133	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	safari	BUSA	2013	
134	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	safari	BUSA	2013	
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	safari	BUSA	2013	
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
137	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
140	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
141	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
142	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
144	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
145	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
146	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
147	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	safari	BUSA	2013	
148	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
149	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
150	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
151	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
152	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
153	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
154	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
155	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
156	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
157	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Futura	BUSA	2013	
158	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	SAVELLO/PESCO VTO	SANDARAN TANGAN ARMREST, KAIN	2012	
159	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	SAVELLO/PESCO VTO	SANDARAN TANGAN ARMREST, KAIN	2012	
160	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tempah	KAYU KACA	2013	
161	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	TEMPAH	KAYU	2013	
162	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tempah	KAYU KACA	2013	
163	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tempah	KAYU KACA	2013	
164	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tempah	kayu/ kaca	2014	
165	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tempah	Kayu	2015	
166	Microphone	Shure SE 58	Besi	2011	
167	Microphone	Shure SE 58	Besi	2011	
168	Microphone	Shure SE 58	Besi	2011	
169	Loudspeaker	TOA	PLASTIK	2016	
170	Loudspeaker	TOA	PLASTIK	2016	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
171	Pelampung Life Jacket	MARES ROVER	NYLON	2012	
172	Pelampung Life Jacket	MARES ROVER	NYLON	2012	
173	Pelampung Life Jacket	MARES ROVER	NYLON	2012	
174	Pressure Gauge (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	DIVE GAUGE MARES MISSION 2D	PLASTIK	2012	
175	Pressure Gauge (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	DIVE GAUGE MARES MISSION 2D	PLASTIK	2012	
176	Pressure Gauge (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	DIVE GAUGE MARES MISSION 2D	PLASTIK	2012	
177	P.C Unit	hp	PLASTIK	2018	
178	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson/L360	PLASTIK	2018	
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET M 102A	PLASTIK	2018	
180	Meja Kerja Besi/Metal	ARM REST	KAYU/BESI	2018	
181	Kursi Besi/Metal	ARM REST	BESI	2018	
182	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova	Besi	2006	
183	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza	Besi	2006	
184	Pick Up	Toyota Dyna	01/BASTB/SETDA/IV/2018	2015	
185	Sepatu Katak Baju Selam Basah (Wet Suite)	MARES S.CHANNEL	karet	2012	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
186	Sepatu Katak Baju Selam Basah (Wet Suite)	MARES S.CHANNEL	karet	2012	
187	Sepatu Katak Baju Selam Basah (Wet Suite)	MARES S.CHANNEL	karet	2012	
188	Alat Selam	MARES REFF MAN	fiber/kain	2012	
189	Alat Selam	MARES REFF MAN	fiber/kain	2012	
190	Alat Selam	MARES REFF MAN	fiber/kain	2012	
191	Alat Selam	MARES ROVER	fiber/kain	2012	
192	Alat Selam	MARES ROVER	fiber/kain	2012	
193	Alat Selam Seet	TANK 80 CUTT + K. VALVE	fiber/kain	2012	
194	Alat Selam Seet	TANK 80 CUTT + K. VALVE	fiber/kain	2012	
195	Alat Selam Seet	TANK 80 CUTT + K. VALVE	fiber/kain	2012	
196	Alat Selam Seet	Regulator Rover 2S	fiber/kain	2012	
197	A.C. Split	Samsung	fiber	2019	
198	A.C. Split	Samsung	fiber	2019	
199	A.C. Split	Samsung	fiber	2019	
200	Partisi	Pelaminan	kayu	2019	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
201	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tenda	Besi	2020	Tenda Panggung
202	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tenda	Besi	2020	Tenda Panggung
203	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tenda	Besi	2020	Tenda Panggung
204	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tenda	Besi	2020	Tenda Panggung
205	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
206	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
207	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
208	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
209	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
210	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
211	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
212	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
213	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
214	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
215	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
216	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
217	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
218	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
219	Sepeda	Pacific	Besi	2020	Sepeda
220	Out Boat Motor	Yamaha	PLASTIK	2020	Mesin Tempel
221	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
222	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
223	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
224	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
225	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
226	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
227	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
228	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
229	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
230	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
231	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
232	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
233	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
234	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
235	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
236	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
237	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
238	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
239	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
240	Mesin Pemotong Rumput	Redfox	Besi	2020	
241	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
242	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
243	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
244	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
245	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
246	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
247	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
248	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
249	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
250	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
251	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
252	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tempah	Besi	2020	Tenda Kerucut
253	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
254	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
255	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
256	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
257	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
258	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
259	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
260	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
261	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
262	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
263	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
264	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
265	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
266	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
267	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
268	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
269	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
270	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
271	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
272	Papan Pengumuman	Tempah	Besi	2020	Papan Pengumuman
273	Kendaraan Toilet	Tempah	fiber	2020	Toilet Portable
274	Kendaraan Toilet	Tempah	fiber	2020	Toilet Portable
275	Kendaraan Toilet	Tempah	fiber	2020	Toilet Portable

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
276	Partisi	Tempah	fiber/plastik	2020	Belanja ModaPengadaan Boot Torism Information Centre (CHSE)
277	P.C Unit	Lenovo	fiber/plastik	2020	PC
278	P.C Unit	Lenovo	fiber/plastik	2020	PC
279	Lap Top	Asus	fiber/plastik	2020	Laptop
280	Lap Top	Asus	fiber/plastik	2020	Laptop
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)	kyocera laser	fiber/plastik	2020	Printer
282	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON DS1630	fiber/plastik	2020	Scanner
283	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu SV600	fiber/plastik	2020	Scanner
284	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson DS360W	fiber/plastik	2020	Scanner Portable
285	Camera Digital	Canon	fiber/plastik	2020	Camera Digital
286	Loudspeaker	Yamaha DSR 215	fiber/plastik	2020	Speaker Blutooth
287	Loudspeaker	Yamaha DSR 215	fiber/plastik	2020	Speaker Blutooth
288	Sound System	Yamaha	fiber/plastik	2020	Sound System
289	Megaphone	TOA	fiber/plastik	2020	Megaphone

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
290	Megaphone	TOA	fiber/plastik	2020	Megaphone
291	Megaphone	TOA	fiber/plastik	2020	Megaphone
292	Megaphone	TOA	fiber/plastik	2020	Megaphone
293	Papan Visual/Papan Nama		Besi/Paltik	2020	Videotron
294	Papan Visual/Papan Nama		Besi/Paltik	2020	Videotron
295	Televisi		fiber/plastik	2020	Perangkat Interaktif Media Ruang Rapat
296	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
297	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
298	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
299	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
300	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
301	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
302	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
303	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
304	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
305	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
306	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
307	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
308	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
309	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
310	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
311	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
312	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
313	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
314	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
315	Handy Talky (HT)	Motorola	fiber/plastik	2020	Handy Talky
316	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
317	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
318	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
319	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
320	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
321	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
322	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
323	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
324	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
325	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
326	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
327	CCTV - Camera Control Television System	HIK	fiber/plastik	2020	Camera CCTV
328	Perahu Kayu	Tempah	kayu	2020	Boat Pancung
329	Tangki Air	Pinguin	fiber	2020	Hibah covid(dari PLN Batam)-Wastafel Mobile
330	Mesin Absensi	**Solution X606-S**	Fiber	2021	
331	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	**Savelo Omega G**	Besi/Busa	2021	
332	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	**Savelo Omega G**	Besi/Busa	2021	
333	Filing Cabinet Besi	**LX44P**	Besi	2021	
334	Filing Cabinet Besi	**LX44P**	Besi	2021	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
335	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Tempah	Kayu	2021	
336	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Tempah	Kayu	2021	
337	Sound System	Toa ZA-2240 MPU	Fiber	2021	
338	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
339	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
340	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
341	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
342	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
343	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
344	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
345	Televisi	Samsung 50AU7000	Plastik	2022	Museum
346	P.C Unit	Lenovo AIO A34024IWL	Plastik	2022	Museum
347	P.C Unit	Lenovo AIO A34024IWL	Plastik	2022	Museum
348	Lap Top	Acer Aspire S40 A514I5	Plastik	2022	Museum
349	Bangku Tunggu		Besi	2022	Museum

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
350	Bangku Tunggu		Besi	2022	Museum
351	Bangku Tunggu		Besi	2022	Museum
352	Bangku Tunggu		Besi	2022	Museum
353	Meja 1/2 Biro		Kayu	2022	Museum
354	Meja 1/2 Biro		Kayu	2022	Museum
355	Meja Resepsionis		Kayu	2022	Museum
356	Sofa		Kulit	2022	Museum
357	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		Kayu	2022	Museum
358	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		Kayu	2022	Museum
359	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		Busa/ Besi	2022	Museum
360	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		Busa/ Besi	2022	Museum
361	A.C. Split	Samsung	Besi/ Plastik	2022	Museum
362	A.C. Split	Samsung	Besi/ Plastik	2022	Museum
363	A.C. Split	Samsung	Besi/ Plastik	2022	Museum
364	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tempah	Kayu	2022	Museum

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
365	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	Plastik	2022	Museum
366	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	Plastik	2022	Museum
367	Filing Cabinet Besi	Krisbow	180 X 90 X 39 Cm	2022	Museum
368	Alat Kantor lainnya	Joy-ART	Kaca/Plastik	2022	Museum
369	Alat Kantor lainnya	Joy-ART	Kaca/Plastik	2022	Museum
370	Papan Visual/Papan Nama	LED panel p6.67 outdor	Besi/Plastik	2022	Videotron
371	A.C. Sentral	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
372	A.C. Sentral	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
373	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
374	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
375	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
376	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
377	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
378	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
379	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	pencatatan barang belum tercatat
380	A.C. Split	KPTS. 23/SEKDA-PBMD/HK/V/2022	Besi/Plastik	2014	
381	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER 107A/W	Platik	2023	
382	Camera Digital	canon EOS M50 MARK II	Plastik	2023	
383	Peralatan Studio Audio Lainnya	RS3 Combo Gimbal Stabilizer	Baesi	2023	
384	Lemari Kayu		Kayu	2023	
385	Lemari Kayu		Kayu	2023	
386	Lemari Kayu		Kayu	2023	
387	Lemari Kayu		Kayu	2023	
388	Lemari Kayu		Kayu	2023	
389	A.C. Split	Panaconic	Plastrik	2023	
390	P.C Unit	Axioo	Plastik /Besi	2023	
391	P.C Unit	Axioo	Plastik /Besi	2023	
392	P.C Unit	Axioo	Plastik	2023	
393	P.C Unit	Axioo	Plastik /Besi	2023	

No.	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
394	Lap Top	Axioo	Plastik /Besi	2023	
395	P.C Unit	Acer Veriton Z4 AIO-Core 17(VZ4/0033	Plastik	2024	
396	Lap Top	Acer Travelmate P214 Core-17(TMP214/0038	Plastik	2024	
397	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET 107A/W	Plastik	2024	
398	P.C Unit	ACER PC VERITON X-CORE 15	Plastik	2024	
399	P.C Unit	ACER PC VERITON X CORE 15	Plastik	2024	
400	P.C Unit	ACER PC VERITON X CORE 15	Plastik	2024	
401	P.C Unit	ACER PC VERITON X CORE 15	Plastik	2024	
402	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DE 530 II	Plastik	2024	
403	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DE 530 II	Plastik	2024	
404	A.C. Split	5 PK	Plastik	2024	Museum
405	A.C. Split	5 PK	Plastik	2024	Museum
406	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET 107A/W	Plastik	2024	
407	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HAP LASERJET107A/W	Plastik	2024	
408	A.C. Split	2PKHISENSE	Plastik	2024	
409	A.C. Split	2PKHISENSE	Plastik	2024	

Sumber: Disbudpar Kota Batam 2025

Tabel 2.16 Daftar Aset Gedung dan Bangunan Disbudpar Kota Batam

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Letak / Lokasi / Alamat	Luas Tanah (M^2)	Luas Bangunan	Koordinat	Bangunan		
							Kondisi	Konstruksi	Jumlah Lantai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2009	Jl. Raja Isa No. 20 Batam Centre	0.0	1,396.1 m2/	Koordinat gedung : N 0395152 / 0124086	Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Jl. Raja Isa No. 20 Batam Centre	0.0			Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Jl. Raja Isa No. 20 Batam Centre	0.0			Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	Jl. Raja Isa No. 20 Batam Centre	0.0			Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	Jl. Raja Isa No. 20 Batam Centre	0.0			Baik	Beton	1
2	Bangunan Gedung Musium Permanen	2004	Jl. Tumenggung Abdul Jamal RT. 01 RW. 01 Kel.	42	32	Koordinat N0101263 / E10352850.	Baik	Beton	1

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Letak / Lokasi / Alamat	Luas Tanah (M²)	Luas Bangunan	Koordinat	Bangunan		
							Kondisi	Konstruksi	Jumlah Lantai
			Bulang Lintang Kec. Bulang						
3	Pagar Permanen	2008	Batam Centre	80000.0		Koordinat gedung : N 0395152 / 0124086	Baik	Beton	1
4	Taman Semi Permanen	2013	Simpang KDA	0.0	103.32 m2	Koordinat gedung: N 0397427 / 0121653	Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2017	Simpang KDA	0.0			Baik	Beton	1
5	Taman Semi Permanen	2013	Simpang Villa Pesona Asri	0.0	103.32 m2	Koordinat : 10715 N 1040605 E	Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2017	Simpang Villa Pesona Asri	0.0			Baik	Beton	1
6	Taman Semi Permanen	2013	Simpang Sei-Harapan Sekupang	0.0	103.32 m2	Koordinat : 10620N 103571 E	Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2017	Simpang Sei-Harapan	0.0			Baik	Beton	1

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Letak / Lokasi / Alamat	Luas Tanah (M²)	Luas Bangunan	Koordinat	Bangunan		
							Kondisi	Konstruksi	Jumlah Lantai
			Sekupang						
7	Taman Semi Permanen	2011	Pantai Dendang Melayu	0.0	33611,27 M2	Kootrdinat N. 1721,522 / E 1043.,28.6488	Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2012	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2013	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2013	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2013	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2013	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2015	Pantai Dendang Melayu, Jembatan I Barelang	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2017	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1
	Taman Semi Permanen	2018	Dendang Melayu kiri	0.0			Baik	Beton	1

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Letak / Lokasi / Alamat	Luas Tanah (M²)	Luas Bangunan	Koordinat	Bangunan		
							Kondisi	Konstruksi	Jumlah Lantai
8	Bangunan Panggung	2012	Lapangan bola Belakang Padang	4.716 M2	447 M2	Koordinat 10910N1035333E	Baik	Beton	1
9	Bangunan Gedung Musium Permanen	2014	Alun-alun Engku Putri Batam Center	0.0	1,508.51 m2	koordinat Gedung : N 0394727 / 0124852	Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Musium Permanen	2014	Alun-alun Engku Putri Batam Center	0.0			Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Musium Permanen	2016	Alun-alun Engku Putri Batam Center	0.0			Baik	Beton	1
	Bangunan Gedung Musium Permanen	2017	Alun-alun Engku Putri Batam Center	0.0			Baik	Beton	1
10	Taman Semi Permanen	2019	Dendang Melayu kanan	26072,47M2	16072,47 M2	Koordinat O5902N 104.02.22 E	Baik	Beton	1

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Letak / Lokasi / Alamat	Luas Tanah (M²)	Luas Bangunan	Koordinat	Bangunan		
							Kondisi	Konstruksi	Jumlah Lantai
11	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2012	Peralihan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		196 m2		Baik	Pulau Abang	1
12	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1986	Gedung Beringin Sekupang	645 m2			KB	NPHD 690/SPJ/WL/1/2022-74/K/KU,.02.02/1/2022 & GAST no. 37/WK/112022 dan 75/K/KU.02.02/1/2022	
13	Gedung Pos Jaga Permanen	2017	Pos Jaga Gedung Beringin	16 m2			KB	NPHD 690/SPJ/WL/1/2022-74/K/KU,.02.02/1/2022 & GAST no. 37/WK/112022 dan 75/K/KU.02.02/1/2022	
14	Pagar Permanen	2015	Pagar Gedung Beringin				KB	NPHD 690/SPJ/WL/1/2022-74/K/KU,.02.02/1/2022 & GAST no. 37/WK/112022 dan 75/K/KU.02.02/1/2022	

Tabel 2.17 Daftar Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Nama Barang	Letak / Alamat	Kondisi	Spesifikasi			Dokumen		Keterangan
				Panjang	Lebar	Tebal	Tanggal	Nomor	
1	Jalan Khusus Lainnya	Pantai Dendang Melayu	Baik	15 M2	4 M2	20 cm2	2012		
2	Jembatan Penyeberangan Orang	Diving Centre Pulau Abang	Baik	6 M2	4 M2	20 cm2	2012		
3	Jalan Khusus Lainnya	Pantai Dendang Melayu Jembatan I	Baik	15 M2	4 M2	20 cm2	2015	02/SPK/PPK/PDTW-TATADENMEL/556/X/2015	Jogging Tack
4	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Pantai Dendang Melayu Jembatan I	Baik	6 cm2	6 cm2	15 cm2	2016		Instalasi Air penataan Pantai dendang Melayu jembatan 1
5	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Gedung LAM					2013		

Tabel 2. 18 Daftar Aset tetap Lainnya

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
1	Alat Musik Tradisional/Daerah	2010	Gendang Panjang	B
2	Alat Musik Tradisional/Daerah	2010	Biola	B
3	Alat Musik Tradisional/Daerah	2010	Gendang Tanjak	B
4	Alat Musik Tradisional/Daerah	2010	Gendang Tanjak	B
5	Alat Musik Tradisional/Daerah	2010	Gambus	B
6	Alat Musik Tradisional/Daerah	2006	Stik Pendek	B
7	Alat Musik Modern/Band	2006	Stik Pendek	B
8	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
9	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
10	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
11	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
12	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
13	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
14	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
15	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Trompet	B
16	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Quint	B
17	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Quint	B
18	Alat Musik Modern/Band	2007	Hardcase Quint	B
19	Alat Musik Modern/Band	2007		B
20	Alat Musik Modern/Band	2014		B
21	Alat Musik Modern/Band	2014		B
22	Alat Musik Modern/Band	2014		B

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
23	Alat Musik Modern/Band	2014		B
24	Alat Musik Modern/Band	2013		B
25	Alat Musik Modern/Band	2013		B
26	Alat Musik Modern/Band	2013		B
27	Alat Musik Modern/Band	2007		B
28	Alat Musik Modern/Band	2007		B
29	Alat Musik Modern/Band	2007		B
30	Alat Musik Modern/Band	2007		B
31	Alat Musik Modern/Band	2007		B
32	Alat Musik Modern/Band	2007		B
33	Alat Musik Modern/Band	2007		B
34	Alat Musik Modern/Band	2007		B
35	Alat Musik Modern/Band	2007		B
36	Alat Musik Modern/Band	2007		B
37	Alat Musik Modern/Band	2007		B
38	Alat Musik Modern/Band	2014		B
39	Alat Musik Modern/Band	2014		B
40	Alat Musik Modern/Band	2014		B
41	Alat Musik Modern/Band	2014		B
42	Alat Musik Modern/Band	2014		B
43	Alat Musik Modern/Band	2014		B
44	Alat Musik Modern/Band	2014		B
45	Alat Musik Modern/Band	2014		B
46	Alat Musik Modern/Band	2014		B

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
47	Alat Musik Modern/Band	2014		B
48	Alat Musik Modern/Band	2014		B
49	Alat Musik Modern/Band	2014		B
50	Alat Musik Modern/Band	2014		B
51	Alat Musik Modern/Band	2014		B
52	Alat Musik Modern/Band	2013		B
53	Alat Musik Modern/Band	2013		B
54	Alat Musik Modern/Band	2013		B
55	Alat Musik Modern/Band	2013		B
56	Alat Musik Modern/Band	2013		B
57	Alat Musik Modern/Band	2013		B
58	Alat Musik Modern/Band	2014		B
59	Alat Musik Modern/Band	2014		B
60	Alat Musik Modern/Band	2014		B
61	Alat Musik Modern/Band	2014		B
62	Alat Musik Modern/Band	2014		B
63	Alat Musik Modern/Band	2014		B
64	Alat Musik Modern/Band	2014		B
65	Alat Musik Modern/Band	2014		B
66	Alat Musik Modern/Band	2014		B
67	Alat Musik Modern/Band	2014		B
68	Alat Musik Modern/Band	2014		B
69	Alat Musik Modern/Band	2013		B
70	Alat Musik Modern/Band	2013		B

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
71	Alat Musik Modern/Band	2011		B
72	Alat Musik Modern/Band	2006		B
73	Alat Musik Modern/Band	2006		B
74	Alat Musik Modern/Band	2006		B
75	Alat Musik Modern/Band	2006		B
76	Alat Musik Modern/Band	2006		B
77	Alat Musik Modern/Band	2006		B
78	Alat Musik Modern/Band	2006		B
79	Alat Musik Modern/Band	2006		B
80	Alat Musik Modern/Band	2006		B
81	Alat Musik Modern/Band	2014		B
82	Alat Musik Modern/Band	2014		B
83	Alat Musik Modern/Band	2014		B
84	Alat Musik Modern/Band	2014		B
85	Alat Musik Modern/Band	2014		B
86	Alat Musik Modern/Band	2014		B
87	Alat Musik Modern/Band	2014		B
88	Alat Musik Modern/Band	2014		B
89	Alat Musik Modern/Band	2014		B
90	Alat Musik Modern/Band	2014		B
91	Alat Musik Modern/Band	2014		B
92	Alat Musik Modern/Band	2014		B
93	Alat Musik Modern/Band	2006		B
94	Alat Musik Modern/Band	2006		B

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
95	Alat Musik Modern/Band	2006		B
96	Alat Musik Modern/Band	2006		B
97	Alat Musik Modern/Band	2007		B
98	Alat Musik Modern/Band	2007		B
99	Alat Musik Modern/Band	2007		B
100	Alat Musik Modern/Band	2014		B
101	Alat Musik Modern/Band	2014		B
102	Alat Musik Modern/Band	2014		B
103	Alat Musik Modern/Band	2014		B
104	Alat Musik Modern/Band	2014		B
105	Alat Musik Modern/Band	2014		B
106	Alat Musik Modern/Band	2007		B
107	Alat Musik Modern/Band	2007		B
108	Alat Musik Modern/Band	2006		B
109	Alat Musik Modern/Band	2014		B
110	Alat Musik Modern/Band	2014		B
111	Alat Musik Modern/Band	2014		B
112	Alat Musik Modern/Band	2014		B
113	Alat Musik Modern/Band	2014		B
114	Alat Musik Modern/Band	2006		B
115	Alat Musik Modern/Band	2014		B
116	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
117	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
118	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
119	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
120	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
121	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
122	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
123	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
124	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
125	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
126	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B
127	Alat Musik Modern/Band	2022	Snare Drum 14x12 Premium series + Sling MPS-P 14In	B

No.	Nama Barang	Tanggal Perolehan	nama barang	KONDISI
128	Alat Musik Modern/Band	2022	Marimba Royal 4.3 Oct Field Frame RMR43	B
129	Alat Musik Modern/Band	2022	M.Bells Royale 2.5 Octave + Harness Fiber MBL 32	B
130	Alat Musik Modern/Band	2022	M.Bells Royale 2.5 Octave + Harness Fiber MBL 32	B
131	Alat Musik Modern/Band	2022	M.Bells Royale 2.5 Octave + Harness Fiber MBL 32	B
132	Alat Musik Modern/Band	2022	M.Bells Royale 2.5 Octave + Harness Fiber MBL 32	B
133	Alat Musik Modern/Band	2022	M.Bells Royale 2.5 Octave + Harness Fiber MBL 32	B

Sarana kantor dalam menunjang kelancaran tupoksi SDM Disbudpar Kota Batam, seperti komputer, laptop, scanner dan printer sangat diperlukan. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga memerlukan perawatan dan peremajaan secara berkala untuk menunjang kelancaran tupoksi SDM Disbudpar Kota Batam. Sedangkan aset tanah memerlukan pemeliharaan dalam bentuk pengurusan sertifikat.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

A. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Nilai SAKIP Disbudpar untuk Tahun Anggaran 2024 (Inspektorat Daerah Kota Batam 2025) adalah 70,86 dengan kategori Sangat Baik.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata tidak terlepas dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam. Peningkatan

kapasitas tersebut mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penguatan kapasitas kelembagaan meliputi:

1. Pengembangan kapasitas SDM, melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, termasuk fasilitas operasional, infrastruktur pendukung kegiatan kebudayaan dan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi informasi yang modern.
3. Penguatan sistem perencanaan, dengan menyusun rencana kerja secara terukur, berbasis data, partisipatif, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses perencanaan serta pengambilan keputusan.
5. Peningkatan efektivitas koordinasi dan kemitraan, baik antar perangkat daerah maupun dengan pihak swasta, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kebudayaan dan pariwisata.
6. Penguatan monitoring dan evaluasi, untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

B. Anggaran dan Realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Disbudpar dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Disbudpar Kota Batam

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15.402.784.020	16.883.353.453	25.407.755.704	27.893.646.085	14.360.654.321	15.893.880.288	21.648.713.197	26.765.467.431	93,2%	94,1%	85,2%	96,0%	23,3%	23,5%
Tujuan 1.1 Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing														
Sasaran 1.1.2 Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam.														
PROGRAM : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.226.075.000	1.750.481.800	8.847.781.461	7.688.797.152	1.098.225.000	1.670.271.603	6.386.945.325	7.607.473.464	89,6%	95,4%	72,2%	98,9%	145,04%	117,9%
KEGIATAN : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	214.500.000	429.873.400	710.164.000	1.334.460.000	180.825.000	402.695.887	678.884.619	1.282.651.000	84,3%	93,7%	95,6%	96,1%	84,5%	93,4%
Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan	214.500.000	429.873.400	710.164.000	1.190.796.000	180.825.000	402.695.887	678.884.619	1.141.786.000	84,3%	93,7%	95,6%	95,9%	77,8%	86,5%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				143.664.000				140.865.000				98,1%		
KEGIATAN : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	261.575.000	1.284.608.400	7.337.617.461	5.895.094.500	167.400.000	1.231.575.716	4.987.636.706	5.868.947.000	64,0%	95,9%	68,0%	99,6%	280,9%	319,5%
Sub Kegiatan :Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	97.400.000	488.623.400	541.430.336		66.200.000	481.031.916	487.698.706		68,0%	98,4%	90,1%		104,2%	176,0%
Sub Kegiatan :Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	164.175.000	795.985.000	6.796.187.125	5.895.094.500	101.200.000	750.543.800	4.499.938.000	5.868.947.000	61,6%	94,3%	66,2%	99,6%	375,1%	390,5%
KEGIATAN :Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	36.000.000	800.000.000	459.242.652	750.000.000	36.000.000	720.424.000	455.875.464	100,0 %	100,0 %	90,1%	99,3%	661,5%	589,8%
Sub Kegiatan :Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	750.000.000	36.000.000	800.000.000	459.242.652	750.000.000	36.000.000	720.424.000	455.875.464	100,0 %	100,0 %	90,1%	99,3%	661,5%	589,8%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	179.536.000	38.080.000	63.414.000	105.506.000	111.565.500	38.080.000	49.802.000	83.156.000	62,1%	100,0 %	78,5%	78,8%	18,0%	10,6%
KEGIATAN : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	179.536.000	38.080.000	63.414.000	105.506.000	111.565.500	38.080.000	49.802.000	83.156.000	62,1%	100,0 %	78,5%	78,8%	18,0%	10,6%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Sub Kegiatan :Penetapan Cagar Budaya	179.536.000	38.080.000	63.414.000	105.506.000	111.565.500	38.080.000	49.802.000	83.156.000	62,1%	100,0 %	78,5%	78,8%	18,0%	10,6%
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	386.201.485	1.368.914.160	1.241.895.900	1.187.397.000	331.023.751	1.212.978.462	1.160.359.284	1.117.687.500	85,7%	88,6%	93,4%	94,1%	80,3%	86,1%
KEGIATAN : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	386.201.485	1.368.914.160	1.241.895.900	1.187.397.000	331.023.751	1.212.978.462	1.160.359.284	1.117.687.500	85,7%	88,6%	93,4%	94,1%	80,3%	86,1%
Sub Kegiatan :Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		N/A	441.895.900	800.000.000		N/A	424.057.644	735.246.800			96,0%	91,9%		
Sub Kegiatan :Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	386.201.485	800.000.000	800.000.000		331.023.751	705.814.650	736.301.640		85,7%	88,2%	92,0%		2,4%	5,8%
Sub Kegiatan :Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		568.914.160	N/A	387.397.000		507.163.812	N/A	382.440.700		89,1%		98,7%		
Tujuan 1.2 Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif														
Sasaran 1.2.4 Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah														
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.284.666.700	461.616.140	641.783.800	1.297.470.000	1.212.035.100	416.137.500	608.628.450	1.249.548.131	94,3%	90,1%	94,8%	96,3%	25,7%	28,6%
KEGIATAN :	914.990.000	461.616.140	-	395.133.000	856.074.000	416.137.500	-	375.437.000	93,6%	90,1%		95,0%		

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	726.530.000	219.319.000			692.021.000	201.179.500			95,3%	91,7%				
Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				395.133.000				375.437.000				95,0%		
Sub Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	188.460.000	N/A			164.053.000	N/A			87,0%					
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		242.297.140				214.958.000				88,7%				
KEGIATAN : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	369.676.700	-	641.783.800	902.337.000	355.961.100	-	608.628.450	874.111.131	96,3%		94,8%	96,9%		
Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	369.676.700	N/A	128.821.000		355.961.100	N/A	113.615.700		96,3%		88,2%			
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		N/A				N/A								
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		N/A				N/A								

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Sub Kegiatan : Pengelolaan Investasi Pariwisata		N/A				N/A								
Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			512.962.800	568.910.000			495.012.750	558.036.000			96,5%	98,1%		
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota				333.427.000				316.075.131				94,8%		
PROGRAM : PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	192.350.000	214.075.000	1.478.277.900	2.911.105.450	169.752.600	199.410.850	873.810.478	2.849.360.850	88,3%	93,1%	59,1%	97,9%	232,9%	193,9%
KEGIATAN : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	192.350.000	214.075.000	1.478.277.900	2.911.105.450	169.752.600	199.410.850	873.810.478	2.849.360.850	88,3%	93,1%	59,1%	97,9%	232,9%	193,9%
Sub Kegiatan : Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		N/A		1.179.314.250		N/A		1.165.613.210				98,8%		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	192.350.000	214.075.000	1.478.277.900	1.531.791.200	169.752.600	199.410.850	873.810.478	1.490.514.790	88,3%	93,1%	59,1%	97,3%	201,8%	142,1%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri		N/A				N/A								
Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		N/A		200.000.000		N/A		193.232.850				96,6%		
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.221.098.500	2.291.458.470	1.906.505.000	2.341.801.000	2.069.122.500	2.138.636.345	1.827.562.183	2.246.721.407	93,2%	93,3%	95,9%	95,9%	3,1%	3,9%
KEGIATAN : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.678.037.500	2.291.458.470	1.906.505.000	2.341.801.000	1.568.526.400	2.138.636.345	1.827.562.183	2.246.721.407	93,5%	93,3%	95,9%	95,9%	14,2%	14,9%
Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		605.743.610	515.284.000			535.965.975	471.235.183			88,5%	91,5%			
Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	369.682.871	N/A			348.065.150	N/A			94,2%					
Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	123.225.429	N/A			122.182.750	N/A			99,2%					

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Kemitraan Pariwisata														
Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	951.869.200	1.685.714.860	324.995.000	322.645.000	877.455.500	1.602.670.370	316.634.000	313.497.000	92,2%	95,1%	97,4%	97,2%	-1,4%	0,5%
Sub Kegiatan : Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	233.260.000	N/A			220.823.000	N/A			94,7%					
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		N/A	1.066.226.000	2.019.156.000		N/A	1.039.693.000	1.933.224.407			97,5%	95,7%		
KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	543.061.000	-	-	-	500.596.100	-	-	-	92,2%					
Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	543.061.000	N/A			500.596.100	N/A			92,2%					
Sub Kegiatan : Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif		N/A				N/A								
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.912.856.335	10.758.727.883	11.228.097.643	12.361.569.483	9.368.929.870	10.218.365.528	10.741.605.477	11.611.520.079	94,5%	95,0%	95,7%	93,9%	7,7%	7,4%
KEGIATAN :	7.372.124.390	8.189.839.576	8.156.985.397	8.761.932.529	7.108.037.145	7.854.525.074	7.917.448.384	8.471.575.634	96,4%	95,9%	97,1%	96,7%	6,0%	6,1%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.292.204.390	8.131.159.576	8.106.545.397	8.761.932.529	7.040.037.145	7.806.841.074	7.869.905.384	8.471.575.634	96,5%	96,0%	97,1%	96,7%	6,4%	6,4%
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.920.000	58.680.000	50.440.000		68.000.000	47.684.000	47.543.000		85,1%	81,3%	94,3%			
KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	8.131.159.576	8.106.545.397	107.176.000	-	7.806.841.074	7.869.905.384	80.268.671		96,0%	97,1%	74,9%		
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		8.131.159.576	8.106.545.397	107.176.000		7.806.841.074	7.869.905.384	80.268.671		96,0%	97,1%	74,9%		
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.111.000	98.532.652	183.823.750	315.007.000	128.826.405	93.568.368	168.627.493	283.113.575	75,7%	95,0%	91,7%	89,9%	38,6%	40,2%
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		N/A	10.705.000			N/A	10.320.000				96,4%			
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.715.000	47.766.750	47.179.250	32.567.000	49.615.000	47.163.000	45.211.500	31.624.000	90,7%	98,7%	95,8%	97,1%	-15,0%	-13,0%
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		N/A		98.578.000		N/A		96.400.000				97,8%		
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		N/A	34.070.000	56.558.000		N/A	31.990.000	54.580.000			93,9%	96,5%		
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan	60.502.000	30.714.902	48.550.500	29.020.000	46.435.200	30.714.898	45.807.750	25.486.000	76,7%	100,0 %	94,4%	87,8%	-10,5%	-9,7%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Penggandaan														
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	10.800.000	7.200.000	7.200.000	4.793.000	9.900.000	7.200.000	7.200.000	88,8%	91,7%	100,0 %	100,0 %	22,2%	26,4%
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.494.000	9.251.000	36.119.000	91.084.000	27.983.205	5.790.470	28.098.243	67.823.575	56,5%	62,6%	77,8%	74,5%	120,4%	149,1%
KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.900.000		103.550.000	-	57.638.300		94.300.000	-	88,8%		91,1%			
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	59.900.000	N/A	63.000.000		52.950.800	N/A	55.000.000		88,4%		87,3%			
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	N/A	40.550.000		4.687.500	N/A	39.300.000		93,8%		96,9%			
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.071.745	2.190.015.655	2.457.712.496	2.541.932.594	1.746.926.157	2.023.101.586	2.268.069.100	2.195.617.099	89,1%	92,4%	92,3%	86,4%	9,1%	8,2%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.012.828.800	1.158.180.000	1.400.200.000	1.570.200.000	807.632.410	1.007.273.874	1.217.441.232	1.275.474.677	79,7%	87,0%	86,9%	81,2%	15,8%	16,8%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	947.242.945	1.031.835.655	1.057.512.496	971.732.594	939.293.747	1.015.827.712	1.050.627.868	920.142.422	99,2%	98,4%	99,3%	94,7%	1,1%	-0,3%
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.649.200	280.340.000	326.026.000	635.521.360	327.501.863	247.170.500	293.160.500	580.945.100	94,7%	88,2%	89,9%	91,4%	30,8%	30,7%
Sub Kegiatan :				40.480.000				37.497.000				92,6%		

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan														
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.174.200	150.890.000	150.890.000	110.410.000	110.354.063	118.860.500	128.120.500	103.318.500	91,8%	78,8%	84,9%	93,6%	-0,4%	-1,3%
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.275.000	19.650.000	65.000.000	39.000.000	28.375.000	19.410.000	63.600.000	38.766.000	93,7%	98,8%	97,8%	99,4%	51,9%	52,3%
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.200.000	109.800.000	110.136.000	445.631.360	188.772.800	108.900.000	101.440.000	401.363.600	96,7%	99,2%	92,1%	90,1%	87,1%	82,2%

Tabel 2.19 merupakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Disbudpar Kota Batam selama periode 2021-2024. Dalam tabel dapat dilihat bagaimana rasio antara realisasi dan anggaran setiap tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapelitbangda/Disbudpar Kota Batam.

Kemudian **pada tahun 2021** anggaran sebesar Rp. 8.039.659.630,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 7 program dan 13 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah realisasi keuangan sebesar 90,32%. dengan penyerapan dana sebesar Rp. 7.261.617.176,00.

Kemudian **pada tahun 2022** anggaran yang dikelola sebesar Rp. 16.883.353.453,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu terdiri dari 7 program dan 13 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah realisasi keuangan sebesar 94,14%. dengan penyerapan dana sebesar Rp. 15.893.880.288,00.

Selanjutnya yaitu **pada tahun 2023** anggaran yang diterima sesuai dengan APBD-P tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 25.407.755.704,00. Pada tahun 2023 program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 7 program dan 15 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 yaitu realisasi keuangan sebesar 85,21% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 21.648.712.197,00.

Berikutnya yaitu **pada tahun 2024** mengelola anggaran sesuai dengan APBD-P tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 27.893.646.085,00 Selama tahun 2024 terdapat 7 program dan 15 kegiatan. Dalam pelaksanaannya realisasi keuangan sebesar 95,96% dengan penyerapan dana sebesar Rp.26.765.467.431,00

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Disbudpar, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. Perangkat daerah lain dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program; serta

3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
4. Asosiasi
5. Pokdarwis

Tabel 2.20 Sasaran Layanan

Stakeholder / **Urusan**	**Pariwisata**	**Kebudayaan**
PEMERINTAH	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) KEPRI	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam (CKTR); 2. Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) KEPRI
AKADEMIS	Batam Tourism Politeknik	Universitas Universal
KOMUNITAS	POKDARWIS; Pelaku EKRAF	LAM
SWASTA	ASITA; PHRI; HPI;	ASPPI
MEDIA MASSA	Batam Televisi, Media Cetak Batam, Media Online	Batam Televisi, Media Cetak Batam, Media Online

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam menggunakan metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi tantangan serta peluang baik dari dalam (Internal) maupun dari luar (Eksternal) untuk memberikan Pelayanan kebudayaan dan kepariwisataan kearah yang lebih baik lagi. Adapun hasil dari analisis SWOT itu adalah sebagai berikut :

A. Internal

Strength (Kekuatan)

1. Letak Kota Batam yang sangat strategis serta bersebelahan dengan negara Singapura sebagai lalu lintas perdagangan dunia
2. Heterogenitas etnis serta budaya
3. Adanya Perda kepariwisataan
4. Sarana wisata serta transportasi yang memadai
5. Aksesbilitas menuju objek wisata sangat menunjang
6. Adanya pelabuhan-pelabuhan Internasional
7. Banyaknya lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebagai sarana wisata
8. Banyaknya masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya melayu
9. Banyaknya budaya dari berbagai etnis dibatam

Weakness (Kelemahan)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan
2. Kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti/mengetahui kegiatan dunia kepariwisataan dan budaya
3. Belum optimalnya upaya promosi kepariwisataan seni dan budaya
4. Kurangnya pengembangan potensi wisata
5. Belum di kelolanya obyek-obyek wisata bahari oleh Pemerintah Daerah
6. Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
7. Belum berperan aktifnya SDM pariwisata itu sendiri
8. Masih rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan bagi turis yang berkunjung
9. Obyek-obyek wisata yang belum terdata/terhimpun secara baik
10. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pentas seni budaya daerah dari berbagai etnis
11. Kurangnya kreatifitas dan ide-ide dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata

B. Eksternal

Opportunity (Peluang)

1. Undang-undang No.23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah

2. Budaya melayu yang masih kukuh di tengah-tengah masyarakat
3. Etnis budaya yang beragam (heterogen)
4. Infrastruktur batam yang memadai (jalan, pelabuhan, bandara, hotel, restoran ,dll)
5. Berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia
6. Kebijakan pariwisata yang memberikan peluang kepada budaya melayu untuk berkembang
7. Aksesbilitas kewilayahan dari berbagai arah sangat baik
8. Terbuka luas peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata
9. Potensi investor yang berminat dalam upaya pengembangan pariwisata seni dan budaya sangat baik
10. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional
11. Perhatian pemerintah pusat yang cukup besar terhadap daerah Batam sebagai daerah khusus
12. Masih tersedianya kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan
13. Adanya Kemajuan ilmu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan Pariwisata Batam

Thread (Hambatan/Ancaman)

1. Kondisi keamanan nasional yang kurang kondusif
2. Masih luasnya kepentingan pusat melalui BOB
3. Lahan bagi investor masih berada ditangan BOB
4. Arus globalisasi dan arus informasi komunikasi mengancam budaya bangsa
5. Seni dan tradisi budaya yang kurang diminati generasi muda
6. Kepariwisataan yang tidak berkembang/monoton
7. Banyaknya pungli dimasyarakat untuk Destinasi Wisata
8. Tidak adanya kepastian hukum bagi investor
9. Wisata Batam sebagai tempat hiburan berimage negative
10. Pelaku dunia usaha belum seluruhnya bersatu dalam hal pengembangan Batam sebagai daerah tujuan wisata
11. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah
12. Belum maksimalnya jaminan keamanan bagi wisatawan
13. Belum maksimalnya promosi kepariwisataan.

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Disbudpar Kota Batam, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah yaitu: ***belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan***, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.21 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kunjungan Wisatawan	Belum optimalnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata.	Strategi digital marketing belum optimal
			Kapasitas dan sumber daya promosi terbatas (manusia, dana, jaringan)
			Kurangnya diversifikasi produk wisata yang unik untuk dibagikan ke pasar
		Masih kurangnya Pelestarian Kebudayaan / Cagar Budaya	Kurangnya data dan kajian akademis/budaya yang sah tentang keberadaan & kondisi cagar budaya
			SDM dengan kompetensi pelestarian budaya terbatas
			Banyak situs sejarah & benda cagar budaya yang belum ditetapkan atau belum dilindungi, sehingga kurang bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik budaya

2.3 Telaahan Dokumen Lainnya

A. Telaahan RPJMN 2025-2029

Telaahan RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk membantu merumuskan isu strategis (Menteri Dalam Negeri 2025). RPJMN 2025-2029 menyebutkan adanya dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan Pembangunan *(development constraint)*, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas ruang fiskal yang terbatas yang merupakan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam (Presiden Republik Indonesia 2025). Sementara itu tantangan pembangunan nasional

mencakup: (1) Rendahnya produktivitas (2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat (4) Kebutuhan Hidup tinggi pada Usia Produktif (5) Krisis Lingkungan (6) Geopolitik dan Geoekonomi (7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah (Presiden Republik Indonesia 2025).

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam perumusan Visi daerah Kota Batam telah memperhatikan dan sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Asta Cita sendiri merupakan 8 misi yang diusung Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah: ”BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global. 2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan. 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. 4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*. 5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Disbudpar Kota Batam di bidang perencanaan pembangunan berkaitan dengan misi daerah dalam "Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*".

C. Telaahan Renstra Kementerian Kementerian PPN/Bappenas

Arah kebijakan Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029 adalah sebagai berikut:

(1) **Manajemen resiko pembangunan nasional** (Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional);
(2) **Pengawalan Sistem Akuntabilitas Pembangunan Nasional** (Perpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang dalam tahap harmonisasi;
(3) **Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;**
(4) Fokus Terhadap Perencanaan Jangka Menengah Nasional;
(5) Pencarian Sumber Pendanaan Alternatif dan Penerapan Blended Finance dalam RKP; (
6) Pelaksanaan Koordinasi SDGs oleh Kementerian PPN/Bappenas (Perpres Nomor 111 Tahun 2023);
(7) **Optimalisasi Satu Data Indonesia (**Perpres Nomor 39 Tahun 2019);
(8) Manajemen Talenta Kementerian PPN/Bappenas;
(9) Manajemen Kinerja Terintegrasi (PN RKP-IKU-PK-SKP-LKJ);
(10) Budaya organisasi BerAKHLAK;
(11) Pembangunan Integritas Pegawai ASN.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Salah satu tugas dan fungsi Disbudpar Kota Batam diantaranya adalah penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah Kota. Berkaitan dengan penyelenggaraan perencanaan, Disbudpar Kota Batam memiliki tugas untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Dalam hal ini Disbudpar Kota Batam menyusun dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Adapun RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pendanaan pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pada proses perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan lainnya, dalam hal ini yaitu RTRW, sebagai dokumen perencanaan tata ruang yang memuat penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, yang dilaksanakan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah, dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tugas dan fungsi Disbudpar Kota Batam dalam menjaga keselarasan perencanaan pembangunan daerah, menjadi kunci utama tercapainya sinergi perencanaan pembangunan daerah yang bersifat spasial maupun aspasial. Dalam hal ini, Disbudpar Kota Batam memiliki tanggung jawab untuk memastikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kota. Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki fungsi matra spasial dari RPJPD sehingga tidak terlepas dari konteks penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, serta diperkuat

dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana, dan arahan zonasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan.

Hal-hal yang menjadi acuan dalam proses sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, diantaranya adalah bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Batam adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf internasional. Sedangkan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Batam, meliputi: a. pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki; b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota; c. peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung; d. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya; dan e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Disbudpar Kota Batam juga memiliki fungsi pelayanan penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, meliputi perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta pemerintahan dan pembangunan manusia, yang dalam penyusunannya memerlukan sinkronisasi/penyelarasan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang tertuang dalam RTRW Kota Batam. Adapun berkaitan dengan fungsi pelayanan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan diantaranya untuk mewujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) dengan dokumen perencanaan penataan ruang daerah (RTRW Kota). Dalam hal ini, Disbudpar Kota Batam melaksanakan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi, dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Batam telah berpedoman pada RTRW Kota Batam.

E. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, pada proses perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah diperlukan juga sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan lainnya, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Disbudpar Kota Batam dalam hal ini bertugas untuk mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan RPPLH. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu, dan memuat rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, proses sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan RPPLH selanjutnya diselenggarakan melalui penyusunan KLHS, yaitu kajian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan. Dalam hal ini, KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD dan RPJMD, wajib disertai dengan penyusunan KLHS. Dalam hal ini, dokumen KLHS menjadi salah satu kelengkapan dokumen yang harus disampaikan pada proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang dilaksanakan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri.

Rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Batam berdasarkan KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut: (1) Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan, (2) Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan, (3) Ketahanan Pangan, (4) Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan, (5) Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesetaraan Gender, (6) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, (7) Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM, (8) Pengendalian Laju Inflasi, (9) Pusat Ekonomi Wilayah, (10) Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku, (11) Pengelolaan Limbah dan Persampahan, (12) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Kerusakan Lingkungan, (13) Alih Fungsi lahan, (14) Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan *Urban Heat Island* (UHI), (15) Peningkatan Ancaman Bencana Alam Akibat Perilaku Manusia, (16) Pelaksanaan Regulasi dan Hukum, serta (17) Peningkatan Pelaksanaan *Good and Smart Governance*.

Disbudpar Kota Batam memiliki peran strategis dan legal sebagai penanggung jawab integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah melalui KLHS. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga wajib secara hukum, dan menjadi elemen kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

Peran tersebut, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Disbudpar dalam penyusunan KLHS yaitu sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa KLHS wajib dilakukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program. *Kedua,* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur tentang kewajiban penyusunan KLHS dalam proses perencanaan pembangunan. *Ketiga,* Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan KLHS di tingkat daerah. *Keempat,* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur tentang integrasi perizinan lingkungan yang relevan dengan KLHS. *Kelima,* Peraturan Wali Kota Batam Nomor 160 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2024: Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Disbudpar yang mencakup aspek lingkungan hidup.

Sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, Disbudpar Kota Batam memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam kebijakan dan perencanaan jangka menengah melalui dokumen KLHS, yang mencakup, *pertama,* sebagai kordinator proses penyusunan KLHS untuk menginisiasi dan memimpin penyusunan KLHS sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD dan RTRW serta membentuk tim teknis lintas sektor untuk menyusun dan mengkaji dokumen KLHS.

Kedua, sebagai penyedia data pembangunan, hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, serta arah kebijakan RPJMD baru sebagai bahan kajian dalam KLHS. *Ketiga,* sebagai integrator rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD, yakni mengintegrasikan hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dalam Isu strategis pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan, sasaran dan indikator RPJMD serta program dan kegiatan prioritas. *Keempat,* sebagai fasilitator konsultasi publik yang menyelenggarakan FGD, forum teknis, dan konsultasi publik untuk menjamin partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS.

Kelima, sebagai penjamin kualitas dan sinkronisasi, yakni menyelaraskan KLHS dengan dokumen tata ruang (RTRW), dokumen lingkungan lainnya (RPPLH, RAD-GRK), dan rencana pembangunan lintas sektor dan memastikan KLHS layak dan valid untuk diadopsi ke RPJMD. Serta *keenam,* melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rekomendasi KLHS, kemudian setelah RPJMD disahkan, Disbudpar bertanggung jawab untuk mengawal implementasi rekomendasi KLHS, menyusun indikator pengukuran dampak kebijakan dan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam evaluasi tahunan (LKPJ dan evaluasi RPJMD).

Tabel 2. 22 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kota Batam

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	1. Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan
	2. Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan
	3. Ketahanan Pangan
	4. Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan
	5. Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesetaraan Gender
	6. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah,
	7. Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM,
	8. Pengendalian Laju Inflasi,
	9. Pusat Ekonomi Wilayah,
	10. Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku,
	11. Pengelolaan Limbah dan Persampahan
	12. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Kerusakan Lingkungan,
	13. Alih Fungsi lahan,
	14. Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan *Urban Heat Island* (UHI),
	15. Peningkatan Ancaman Bencana

2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Bappenas, Renstra Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Disbudpar sebagai berikut:

Tabel 2.23 Isu Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS yang Relevan dengan PD**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD**			**Isu Startegis PD**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
PARIWISATA						
BIDANG EKONOMI KREATIF		1. Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM 2. Pusat Ekonomi Wilayah	Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang belum optimal	Pengembangan potensi ekonomi berbasis ekonomi kreatif yang perlu dioptimalkan
Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Belum Optimalnya pengumpulan data pelaku usaha Ekonomi Kreatif					
BIDANG SARANA DAN OBJEK WISATA						
Meningkatnya Jumlah destinasi Wisata yang sesuai standar	Kurangnya Informasi Jumlah destinasi Wisata yang sesuai standar		Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Rendahnya Produktivitas		
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI WISATA						
Meningkatnya Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan	Belum Optimalnya Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan					
KEBUDAYAAN						
BIDANG KEBUDAYAAN			Pergeseran Identitas Budaya Dampak dari Teknologi Informasi		Pemajuan Budaya melayu yang belum optimal	Penguatan nilai dan identitas budaya lokal melalui pelestarian dan inovasi kebudayaan
jumlah pelaku seni (seluruh yg berpatisipasi dalam seni dan budaya)	Belum Optimalnya jumlah pelaku seni (seluruh yg berpatisipasi dalam seni dan budaya)					

1. Bidang Ekonomi Kreatif

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Batam menunjukkan tren peningkatan, ditandai dengan tumbuhnya jumlah pelaku usaha dan diversifikasi produk berbasis kreativitas masyarakat. Potensi ini menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing wilayah.

Namun demikian, pengelolaan data dan informasi pelaku ekonomi kreatif masih perlu dioptimalkan agar dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang akurat dan terarah. Penguatan basis data pelaku usaha kreatif juga penting untuk memetakan subsektor unggulan serta mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi dan pembinaan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan hidup seperti transisi menuju ekonomi hijau, pemanfaatan sumber daya lokal, serta digitalisasi ekonomi menjadi tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada optimalisasi potensi kreatif daerah, penguatan ekosistem usaha berbasis UMKM, serta peningkatan kapasitas SDM kreatif melalui kolaborasi dan inovasi berkelanjutan.

2. Bidang Sarana dan Objek Wisata

Kota Batam memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dengan banyaknya objek wisata bahari, buatan, dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang memenuhi standar pelayanan dasar menjadi indikator positif bagi perkembangan industri pariwisata daerah.

Namun, ketersediaan data yang akurat terkait jumlah dan kualitas destinasi wisata masih perlu diperbaiki. Selain itu, sebagian objek wisata memerlukan peningkatan sarana pendukung, pengelolaan lingkungan, dan promosi agar mampu bersaing secara regional maupun nasional.

Dalam konteks keberlanjutan, isu terkait daya dukung lingkungan, perubahan iklim, dan kualitas pengelolaan kawasan wisata menjadi perhatian penting. Arah kebijakan pengembangan difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi wisata berstandar, penguatan tata kelola pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi untuk manajemen destinasi dan layanan wisata.

3. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata

Perkembangan teknologi digital dan tren wisata berbasis pengalaman menjadi peluang strategis bagi Kota Batam dalam memasarkan potensi wisatanya. Pemanfaatan media digital, konten kreatif, dan kolaborasi lintas sektor dapat memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik wisata daerah.

Meskipun demikian, efektivitas promosi wisata masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal integrasi data, pemanfaatan teknologi informasi, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam strategi promosi, baik melalui platform digital, event pariwisata, maupun kerjasama dengan pelaku industri pariwisata regional.

Isu strategis yang relevan meliputi transformasi digital sektor pariwisata, penyesuaian terhadap tren wisata global yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing destinasi melalui branding yang konsisten dan promosi yang terpadu. Arah kebijakan diarahkan pada optimalisasi promosi wisata berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas SDM di bidang pemasaran dan komunikasi pariwisata.

4. Bidang Kebudayaan

Kebudayaan merupakan identitas dan kekuatan sosial yang menjadi dasar pembangunan karakter masyarakat Batam. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, terjadi pergeseran nilai dan pola konsumsi budaya, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini menuntut upaya pelestarian budaya lokal, khususnya budaya Melayu, agar tetap eksis dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pemajuan kebudayaan perlu diorientasikan pada penguatan nilai budaya lokal, pelestarian warisan budaya tak benda, serta inovasi dalam ekspresi budaya melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, pembangunan kebudayaan juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial, memperkaya daya tarik wisata budaya, dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap identitas daerah.

Isu strategis pada bidang kebudayaan mencakup penguatan nilai dan identitas budaya lokal, pengembangan ekosistem pelaku budaya yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, serta pemberdayaan komunitas budaya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Batam berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode Tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran Disbudpar sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Disbudpar.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

"Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata"

Perangkat daerah merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan di daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menentukan tujuan perangkat daerah mengacu pada sasaran pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 karena sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Batam dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sementara tujuan merupakan penjabaran dari misi pembangunan

Sebagai penyelenggara urusan kebudayaan dan urusan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mendukung misi ke-1, yaitu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing

global dan juga misi ke-5, yaitu menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Adapun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai berikut : ***"Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya"***.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara;
2. Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya pelestarian cagar budaya benda dan tak benda;
4. Meningkatkan efisiensi danefektivitas pelayanan pemerintahan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	
Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	**Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya**	**Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata**	**Persentase**	**23.70**	**21,21**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**PAD sektor pariwisata : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan. Rumus = (PAD Pariwisata tahun n-tahun (n-1))/tahun (n-1) dikali 100%**
	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	13,49	12,46	21,43	10,59	11,70	14,29	7,50	14,29	Rumus = Jumlah kunjungan wisatawan tahun n – tahun (n-1) dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1)
	Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase	10,89	11,16	12,05	12,54	12,74	12,99	13,25	12,99	pelaku yang di data tahun (n) = target data tahun (n) + tahun (n-1) rumus : (tahun (n)-tahun lalu (n-1)) / tahun lalu (n-1) x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	
	Meningkatkan efisiensi danefektivitas pelayanan pemerintahan.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Indeks	90,72	90,92	90,95	90,98	91,01	91,04	91,08	91,04	Berdasarkan **PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017**, IKM dihitung menggunakan formulasi berikut: $IKM = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Hasil akhir IKM berada pada skala 0–100 dan dikategorikan dalam interval mutu pelayanan: Nilai IKM — Kategori Mutu Pelayanan 88,31 – 100 — Sangat Baik 76,61 – 88,30 — Baik 65,00 – 76,60 — Cukup Baik 51,00 – 64,99 — Kurang Baik ≤ 50,99 — Tidak Baik
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	**Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.**	**Persentase**	**5.65**	**19.5**	**34.52**	**50**	**65.48**	**80.95**	**100**	**80.95**	**rata-rata nilai dari Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap objek budaya tak benda (%)**
	Meningkatnya pelestarian cagar budaya benda dan tak benda	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang	persentase	7.14	21,43	35.71	50	64.29	78.57	100	78.57	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi keseluruhan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ditetapkan x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	
		Dilestarikan										
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap objek budaya tak benda	persentase	4.17	16,67	33.33	50	66.67	83.33	100	83.33	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Perumusan strategi dan kebijakan dilakukan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata, termasuk transformasi kelembagaan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau promosi destinasi, tetapi juga memperkuat tata kelola, pengelolaan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Perencanaan strategis difokuskan pada:

1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, melalui pengembangan destinasi unggulan, peningkatan daya saing pariwisata, promosi yang terintegrasi, serta dukungan infrastruktur dan SDM.
2. Pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya daerah, baik benda maupun tak benda, melalui penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
3. Transformasi tata kelola dan kinerja kelembagaan, melalui penguatan sistem manajemen, reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi digital untuk peningkatan efisiensi layanan publik dan sistem informasi kebudayaan dan kepariwisataan.
4. Peningkatan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat, dalam mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang inklusif dan berdaya saing.

Melalui strategi dan kebijakan yang dirumuskan secara komprehensif ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat identitas budaya lokal, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Disbudpar dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Disbudpar dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata
MISI 1 :	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global
MISI 5 :	Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**		**KEBIJAKAN**	
1. Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional	1.4. Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah.	1.4.1.	Penguatan iklim usaha yang kondusif berbasis fasilitasi investasi produktif yang berorientasi pada sektor unggulan, pengembangan kepariwisataan daerah serta hilirisasi berkelanjutan guna mewujudkan ekonomi tumbuh dan berdaya saing	1.4.1.3.	Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif
6. Meningkatnya Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	6.1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal	6.1.1.	Penguatan ketahanan sosial kebencanaan, kelestarian lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah	6.1.1.3.	Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan

1. Penguatan Daya Saing Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk mewujudkan Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata yang berdaya saing global, pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, diversifikasi produk wisata, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menekankan pentingnya mengangkat potensi lokal dan karakteristik unik Batam — seperti wisata bahari, budaya Melayu, dan potensi maritim — yang dikolaborasikan dengan kreativitas pelaku ekonomi kreatif. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat posisi Batam di tingkat nasional maupun internasional.

2. Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Kebudayaan menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat Batam. Melalui strategi penguatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Kebijakan diarahkan pada upaya pelestarian warisan budaya tak benda, pemberdayaan komunitas seni dan budaya, serta inovasi dalam ekspresi kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan sebagai sumber kebanggaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3 Tahapan Strategi Disbudpar Kota Batam Tahun 2025-2029

TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah di bidang pariwisata	Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat	Peningkatan daya saing global sektor unggulan berbasis kepariwisataan Penguatan jejaring dan kolaborasi dengan dunia industri	Penguatan Ekosistem Pariwisata
	Penguatan promosi destinasi wisata berbasis digital	Pengembangan platform promosi wisata	Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya		
	Revitalisasi dan pelestarian warisan budaya	Pendataan dan dokumentasi warisan budaya	Optimalisasi media sosial & konten kreatif	Kerja sama promosi dengan pihak swasta	Pemasaran berbasis data wisatawan
	Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan kebudayaan	Pelatihan dasar pelaku wisata & budaya	Pelestarian budaya melalui event lokal	Penguatan edukasi budaya di sekolah & komunitas	Sertifikasi dan pelatihan pelaku budaya

TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	Pengembangan event unggulan daerah	Kalender event tahunan	Sertifikasi kompetensi pelaku wisata	Pengembangan SDM kreatif dan pemandu lokal	Peningkatan manajemen destinasi berbasis SDM
	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang destinasi wisata	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan	Peningkatan kualitas event daerah	Event budaya dan wisata bertaraf nasional	Branding event skala internasional
			Perbaikan fasilitas dasar destinasi	Pembangunan fasilitas pendukung baru	Integrasi kawasan wisata prioritas

Selama periode 2025–2030, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Kota Batam difokuskan pada tiga tahap utama:

1. Tahap Penguatan Dasar (2025–2026)

   Fokus pada pembenahan infrastruktur, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan jejaring kerja sama antar-pemangku kepentingan.

2. Tahap Pengembangan dan Promosi (2027–2028)

   Menekankan pada promosi berbasis digital, pengembangan event unggulan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan kegiatan pariwisata.

3. Tahap Peningkatan Daya Saing Global (2029–2030)

   Berorientasi pada pencapaian daya saing pariwisata dan budaya di tingkat internasional melalui branding global, sertifikasi SDM, serta integrasi pengelolaan kawasan wisata dan budaya berkelanjutan.

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Disbudpar agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Disbudpar merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Disbudpar.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Disbudpar Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	1. Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan	1.1. Peningkatan kualitas dan diferensiasi destinasi wisata budaya, bahari,	Penataan kawasan wisata tematik (heritage trail, wisata pulau,

No.	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
		dengan sektor ekonomi kreatif	kuliner, dan sport tourism	sport tourism)
				Penguatan branding "Visit Batam"
			1.2. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya lokal	Pelatihan promosi digital bagi pelaku wisata dan seni
2.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	1. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan	1.1. Pemberdayaan komunitas seni dan budaya lokal	Revitalisasi Gedung Beringin sebagai pusat seni
			1.2. Pelestarian budaya takbenda dan benda	Dokumentasi dan pengarsipan budaya lokal secara digital

Arah kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam berfokus pada penguatan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah secara terpadu.

Pendekatan yang digunakan menekankan pada dua hal pokok:

1. **Sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif** untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan citra Batam sebagai destinasi unggulan.
2. **Pelestarian nilai-nilai budaya lokal** sebagai identitas daerah dan pondasi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Batam dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Disbudpar untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Teknik Merumuskan Program

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
Meningkatnya kepariwisataan daerah							Sasaran RPJMD
	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya				Persentase Tingkat Pelestarian Kebudayaan (Persentase)		Tujuan PD
		Meningkatnya kunjungan wisatawan			Persentase Pertumbuhan Kunjungan		Sasaran PD

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
		domestik dan mancanegara			Wisatawan		
			Meningkatnya destinasi wisata yang sesuai dengan standar		Persentase destinasi wisata yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Program
				Meningkatnya daya tarik destinasi	Persentase destinasi pariwisata yang terkelola (Dengan Satuan:Persentase)	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Lokasi)	**Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota**	Sub Kegiatan
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Orang)	**Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%) (Dengan Satuan:Persentase)	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kegiatan
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					(Dengan Satuan:Lokasi)		
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		
					Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Usaha)	**Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota**	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Destinasi Wisata sesuai standar		Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Program

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
			yang dipasarkan		(Dengan Satuan:Persentase)		
				Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Berkualitas yang dipasarkan	Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan (Dengan Satuan:DESTINASI)	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Doku	**Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					men)		
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Kegiatan)	**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	**Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Promosi)		
		Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif			Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif		Sasaran PD
			Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif		Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Dengan Satuan:Persentase)	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Program

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Meningkatnya kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Persentase)	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi	**Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)		
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	**Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya benda dan tak benda			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		Sasaran PD
			Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya melalui registrasi provinsi		Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Program
				Meningkatnya penetapan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (Dengan Satuan:Perse	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					ntase)		
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Objek)	**Penetapan Cagar Budaya**	Sub Kegiatan
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Dengan Satuan:Objek)	**Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda**	Sub Kegiatan
				Meningkatnya pengelolaan cagar	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				budaya	Cagar Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:Persentase)		
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Dengan Satuan:Objek)	**Pelindungan Cagar Budaya**	Sub Kegiatan
					Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisa	**Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					si (Dengan Satuan:Objek)		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pelestarian budaya di museum		Persentase Pertumbuhan pengunjung museum (Dengan Satuan:Persentase)	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Program
				Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum (Pelajar, Umum dan Wisatawan)	Jumlah Pengunjung Museum (Dengan Satuan:Kunjungan)	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Dengan Satuan:Unit)	**Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu**	Sub Kegiatan
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan	**Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum**	Sub Kegiatan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	**Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					(Dengan Satuan:Unit)		
					Jumlah Layanan Operasional Museum (Dengan Satuan:Layanan)	**Pengelolaan Operasional Museum**	Sub Kegiatan
					Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya (Dengan Satuan:Unit)	**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi (Dengan Satuan:Unit)	**Revitalisasi Taman Budaya**	Sub Kegiatan
					Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Dengan Satuan:Layanan)	**Pengelolaan Operasional Taman Budaya**	Sub Kegiatan
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya benda dan tak benda			Persentase warisan budaya tak benda yang telah		Sasaran PD

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					ditetapkan terhadap objek budaya tak benda		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan		Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Program
				Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					(Dengan Satuan:Persentase)	**Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**	Sub Kegiatan
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Dengan Satuan:Orang)	**Kebudayaan**	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	**Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan**	Sub Kegiatan
				Meningkatnya pelestarian kesenian	Jumlah Kegiatan Seni Budaya (Dengan	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				tradisional	Satuan:Kegiatan)	**Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dengan Satuan:Laporan)	**Tradisional**	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Dengan Satuan:Sertifikat)	**Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Meningkatnya pembinaan lembaga adat	Jumlah Lembaga Adat yang dibina (Dengan Satuan: Lembaga Adat)	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kegiatan
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat**	Sub Kegiatan
		Meningkatkan kualitas pelayanan			Indeks Kepuasan Masyarakat		Sasaran PD

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
		pemerintahan			di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)		Program

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Satuan:Dokumen)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Sub Kegiatan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Indek Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)		Program

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kegiatan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	**Tugas ASN**	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kegiatan
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					(Dengan Satuan:Paket)		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	Sub Kegiatan
				Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Perse	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				dan Pariwisata	ntase)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	**undangan**	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kegiatan
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	**Pengadaan Mebel**	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					(Dengan Satuan:Unit)		
				Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					(Dengan Satuan:Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Sub Kegiatan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (D	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					e n g a n Satuan:Persentase)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Sub Kegiatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	**Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Sub Kegiatan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (NOMENKLATUR)	KET.
					Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Disbudpar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Disbudpar Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya				Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata (Persentase)	23.70	6,50	21,21	22.274.563.633	6,50	26.636.440.323	6,50	33.185.813.600	6,50	34.276.813.600	6,50	35.829.490.814	6,50	41.218.000.000		
	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	13,49	14,29	12,46	6.868.142.450	21,43	2.741.374.200	10,59	8.925.000.000	11,70	9.025.000.000	14,29	10.537.487.214	7,50	11.825.000.000		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN					1.062.885.000		1.166.456.200		1.550.000.000		1.650.000.000		2.662.487.214		3.450.000.000	8.091.828.414	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	21,17	66,71	27,80	1.062.885.000	36,10	1.166.456.200	44,96	1.550.000.000	55,53	1.650.000.000	66,71	2.662.487.214	80,11	3.450.000.000		KABID SOW
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					650.035.000		554.857.200		900.000.000		1.000.000.000		2.012.487.214		2.800.000.000	5.117.379.414	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya daya tarik destinasi	Persentase destinasi pariwisata yang terkelola (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	25,61	650.035.000	35,96	554.857.200	43,84	900.000.000	51,72	1.000.000.000	62,07	2.012.487.214	77,83	2.800.000.000		A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 4
		3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					650.035.000		554.857.200		600.000.000		600.000.000		1.412.487.214		1.700.000.000	3.817.379.414	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Lokasi)	5	10	7		9		11		13		15		17			A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 4
		3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					0		0		300.000.000		400.000.000		600.000.000		1.100.000.000	1.300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Orang)	0	150	0		0		50		50		50		50			ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 5
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					0		611.599.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	2.561.599.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%) (Dengan Satuan:Persentase)	21,17	66,71	27,80	0	36,10	611.599.000	44,94	650.000.000	55,53	650.000.000	66,71	650.000.000	80,11	650.000.000		ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 5
		3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinas					0		506.067.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	2.006.067.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			i Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lok	316	996	415		539		671		829		996		1196			A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				asi)																
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					0		105.532.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	555.532.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	48	0		12		12		12		12		12			ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 6
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata					412.850.000		0		0		0		0		0	412.850.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah Kabupaten/Kota																	
			Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1	412.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 5
		3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memasti					412.850.000		0		0		0		0		0	412.850.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			kan Kepatuhan P e l a k u U s a h a Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah R e n d a h d i kabupaten/kota																	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawa	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	5	5	5		0		0		0		0		0			A D Y A T A M A KEPARIWI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			san Usaha Pariwisata	(Dengan Satuan:Usaha)																SATAAN DAN EKRAF 5
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.805.257.450		1.574.918.000		7.375.000.000		7.375.000.000		7.875.000.000		8.375.000.000	30.005.175.450	
			Meningkatnya Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan (Dengan Satuan:Persentase)	13,24	90,11	32,91	5.805.257.450	57,35	1.574.918.000	88,31	7.375.000.000	89,57	7.375.000.000	90,11	7.875.000.000	97,19	8.375.000.000		KABID PPW

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					5.805.257.450		1.574.918.000		7.375.000.000		7.375.000.000		7.875.000.000		8.375.000.000	30.005.175.450	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Berkualitas yang dipasarkan	Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan (Dengan Satuan:DESTINASI)	38	746	104	5.805.257.450	238	1.574.918.000	496	7.375.000.000	601	7.375.000.000	746	7.875.000.000	968	8.375.000.000		ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 1
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan					279.043.000		424.517.100		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	2.503.560.100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Luar Negeri																	
			Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	14	1		3		3		3		3		3			A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 1
		3.26.03.2.01.00006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisa					867.971.450		429.804.100		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000	6.622.775.550	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			ta Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	9	1		2		2		2		2		2			A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					4.658.243.000		720.596.800		5.000.000.000		5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000	20.878.839.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Promosi)	2	24	4		5		5		5		5		6			ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 7
	Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif			Persentase Pertumbuhan pelaku	10,89	12,99	11,16	1.609.939.000	12,05	4.518.738.676	12,54	5.750.000.000	12,74	5.950.000.000	12,99	6.750.000.000	13,25	8.750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				usaha ekonomi kreatif (Persentase)																
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.609.939.000		4.518.738.676		5.750.000.000		5.950.000.000		6.750.000.000		8.750.000.000	24.578.677.676	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Dengan Satuan:Persentase)	10,89	12,99	11,16	1.609.939.000	12,05	4.518.738.676	12,54	5.750.000.000	12,74	5.950.000.000	12,99	6.750.000.000	13,25	8.750.000.000		PABIDEKRAF
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						1.609.939.000		4.518.738.676		5.750.000.000		5.950.000.000		6.750.000.000		8.750.000.000	24.578.677.676	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tingkat Dasar																	
			Meningkatnya kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (D e n g a n Satuan:Persentase)	6,70	86,50 %	30,55 %	1.609.939.000	48,75 %	4.518.738.676	64,01 %	5.750.000.000	75,55 %	5.950.000.000	86,50 %	6.750.000.000	94,04 %	8.750.000.000		A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 7
		3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi					348.345.000		648.467.300		750.000.000		750.000.000		750.000.000		1.250.000.000	3.246.812.300	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																	
			Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)	1	5	1		1		1		1		1		1			A D Y A T A M A KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 7

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					1.261.594.000		3.870.271.376		5.000.000.000		5.200.000.000		6.000.000.000		7.500.000.000	21.331.865.376	
			Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonom	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber	80	100	80		100		100		100		100		100			ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKRAF 8

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			i Kreatif	Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)																
	Meningkatkan efisiensi danefektivitas pelayanan pemerintahan.			Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Indeks)	90,72	91,04	90,92	13.796.482.183	90,95	19.376.327.447	90,98	18.510.813.600	91,01	19.301.813.600	91,04	18.542.003.600	91,08	20.643.000.000		
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSA					13.796.482.183		19.376.327.447		18.570.813.600		19.301.813.600		18.602.003.600		20.703.000.000	89.647.440.430	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			N PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai Sakip PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,03	78,53	70,86	013.796.482.183	73,53	8.356.000 19.367.971.447	74,53	15.813.600 18.495.000.000	76,53	16.813.600 19.285.000.000	78,53	17.003.600 18.525.000.000	80,53	18.000.000 20.625.000.000		SEKRETARIS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Indek Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,00	92,67	90,74		90,77		90,80		91,68		92,67		92,71			SEKRETARIS
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		8.356.000		15.813.600		16.813.600		17.003.600		18.000.000	57.986.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	20	100	20	0	20	8.356.000	20	15.813.600	20	16.813.600	20	17.003.600	20	18.000.000		PERENCANA AHLI MUDA
		3.26.01.2.01.00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan					0		3.542.400		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	33.542.400	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perangkat Daerah																	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	9	0		2		3		2		2		3			PERENCANA AHLI MUDA
		3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		4.813.600		5.813.600		6.813.600		7.003.600		8.000.000	24.444.400	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	0	12	0		3		3		3		3		3			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			at Daerah	Daerah (Dengan Satuan:Laporan)																
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.090.665.136		14.226.528.622		15.065.000.000		15.065.000.000		15.065.000.000		15.065.000.000	70.512.193.758	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	11.090.665.136	100	14.226.528.622	100	15.065.000.000	100	15.065.000.000	100	15.065.000.000	100	15.065.000.000		ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.028.685.136		14.161.528.622		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	70.190.213.758	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	45	71	45		71		71		71		71		71			ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
		3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan					61.980.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	321.980.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tugas ASN																	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	51	3		12		12		12		12		12			ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat					37.812.000		82.530.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	420.342.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah																	
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	37.812.000	100	82.530.000	100	40.000.000	100	100.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		60.000.000		0		60.000.000		60.000.000	120.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	1					1				1		1			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					37.812.000		82.530.000		40.000.000		100.000.000		40.000.000		40.000.000	300.342.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	6	6	6		6		4		6		4		4			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.251.000		206.061.325		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	1.577.312.325	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	111.251.000	100	206.061.325	100	420.000.000	100	420.000.000	100	420.000.000	100	420.000.000		KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					51.609.000		59.963.225		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	291.572.225	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	3		1		1		1		1		1			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	150.000.000	
			Tersedianya Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	1	0		1		1		1		1		1			KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tangga	yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)																
		3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	0	0	1	21.520.300	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	171.520.300	KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					36.000.000		39.324.200		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	225.324.200	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		1			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.06.00	Penyediaan Bahan					7.200.000		7.881.600		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	45.081.600	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		06	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	1		4		4		4		4		4			KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16.442.000		77.372.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	693.814.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	3		12		12		12		12		12			KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		602.126.000		50.000.000		750.000.000		50.000.000		150.000.000	1.452.126.000	
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisa	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Pers	100	100	100	0	100	602.126.000	100	50.000.000	100	750.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000		KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			ta	entase)																
		3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		490.095.000		0		0		0		0	490.095.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersediannya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		0		0		0		0			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga					0		0		0		700.000.000		0		0	700.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n																	
			Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		0		0		1		0		0			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	150.000.000	
			Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	0	40	0		10		10		10		10		10			KASUBAG UMP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Disediakan (Dengan Satuan:Unit)																EG
		3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		112.031.000		0		0		0		100.000.000	112.031.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	50	60	0		60		60		60		60		70			KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.336.458.048		1.867.775.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	10.804.235.548	
			Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	2.336.458.048	100	1.867.775.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000		KASUBBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.563.000.000		1.597.800.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	8.260.800.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	8	4		1		1		1		1		1				KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					773.458.048		269.977.500		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	2.543.435.548	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (D e n g a n Satuan:Laporan)	1	6	2		1		1		1		1		1			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik					220.295.999		2.382.948.000		720.000.000		750.000.000		750.000.000		2.750.000.000	4.823.243.999	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	220.295.999	100	2.382.948.000	100	720.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	2.750.000.000		KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.239.999		40.780.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	382.019.999	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	2	1		2		2		2		2		2			KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					112.210.000		111.310.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	643.520.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	5	3		3		3		4		4		5			KASUBAG UMPEG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					65.046.000		87.806.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	452.852.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	50	70	55		50		50		50		70		70			KASUBAG UMPEG
		3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					1.800.000		2.143.052.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.400.000.000	3.344.852.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Bangunan Lainnya																	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1			KASUBAG UMPEG
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan				Persentase Tingkat Pelestarian Kebudayaan (Persentase)	5.65	84.52	19.5	10.682.101.072	38.10	15.731.821.000	53.57	23.425.000.000	69.05	25.125.000.000	84.52	27.350.000.000	100	33.100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
budaya																				
	Meningkatnya pelestarian cagar budaya benda dan tak benda			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (persentase)	7.14	85.71	21,43	10.520.963.072	42.86	15.681.821.000	57.14	22.900.000.000	71.43	24.550.000.000	85.71	26.650.000.000	100	31.800.000.000		
				Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan	4.17	83.33	16,67	161.138.000	33.33	50.000.000	50	525.000.000	66.67	575.000.000	83.33	700.000.000	100	1.300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				terhadap objek budaya tak benda (persentase)																
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					6.703.068.072		13.568.300.600		18.100.000.000		19.450.000.000		21.150.000.000		23.300.000.000	78.971.368.672	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelengg	6,67	33,33	12,50	6.703.068.072	22,22	13.568.300.600	27,27	18.100.000.000	28,57	19.450.000.000	33,33	21.150.000.000	37,50	23.300.000.000		KABID KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			kebudayaan	araan k e g i a t a n kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)																
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.327.941.552		2.047.318.400		1.900.000.000		2.900.000.000		2.400.000.000		3.400.000.000	10.575.259.952	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (Dengan Satuan:Persentase)	20	100	20	1.327.941.552	20	2.047.318.400	20	1.900.000.000	20	2.900.000.000	20	2.400.000.000	20	3.400.000.000		PAMONG BUDAYA 1
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					960.643.552		1.647.660.400		1.500.000.000		2.500.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	8.608.303.952	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	3	19	4		3		4		4		4		4			PAMONG BUDAYA 1
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan					367.298.000		399.658.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	1.366.956.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pranata Kebudayaan																	
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Dengan Satuan:Orang)	100	450	50		100		100		100		100		100			PAMONG BUDAYA 1
		2.22.02.2.01.0004	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebuday					0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	600.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			aan																	
			Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	50	150	0		0		50		50		50		50			PAMONG BUDAYA 1
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat					5.000.219.000		10.520.982.200		16.000.000.000		15.250.000.000		18.400.000.000		18.500.000.000	65.171.201.200	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	Jumlah Kegiatan Seni Budaya (Dengan Satuan:Kegiatan)	10	10	10	5.000.219.000	10	10.520.982.200	10	16.000.000.000	10	15.250.000.000	10	18.400.000.000	10	18.500.000.000		PAMONG BUDAYA 2
		2.22.02.2.02.00001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfa					0		35.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		2.900.000.000		3.000.000.000	8.185.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			atan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	3	12	0		3		3		3		3		3			PAMONG BUDAYA 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					5.000.219.000		10.485.982.200		13.000.000.000		12.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	55.486.201.200	
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dengan	1	6	2		1		1		1		1		1			PAMONG BUDAYA 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tradisional	Satuan:Laporan)																
		2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai					0		0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	1.500.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																	
			Tersedianya Penghargaan kepada Pelaku Seni Budaya dan Pariwisata yang	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaa	10	40	0		10		10		10		10		10			PAM ONG BUDAYA 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata	n (Dengan Satuan:Sertifikat)																
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah					374.907.520		1.000.000.000		200.000.000		1.300.000.000		350.000.000		1.400.000.000	3.224.907.520	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/Kota																	
			Meningkatnya pembinaan lembaga adat	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina (Dengan Satuan: Lembaga Adat)	1	1	1	374.907.520	1	1.000.000.000	1	200.000.000	1	1.300.000.000	1	350.000.000	1	1.400.000.000		PAMONG BUDAYA 3
		2.22.02.2.03.00002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					374.907.520		1.000.000.000		200.000.000		1.300.000.000		350.000.000		1.400.000.000	3.224.907.520	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		50		50		50		50		50			PAM ONG BUDAYA 3
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					161.138.000		50.000.000		525.000.000		575.000.000		700.000.000		1.300.000.000	2.011.138.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya melalui registrasi provinsi	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	7,14	78,57	21,43	161.138.000	35,71	50.000.000	50,00	525.000.000	64,29	575.000.000	78,57	700.000.000	100	1.300.000.000		KABID KEBUDAYAAN
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					161.138.000		50.000.000		350.000.000		400.000.000		500.000.000		1.100.000.000	1.461.138.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya penetapan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat kota (Dengan Satuan:Persentase)	56	59,65	76	161.138.000	42,22	50.000.000	48,97	350.000.000	54,71	400.000.000	59,65	500.000.000	63,93	1.100.000.000		PAMONG BUDAYA 1
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya					161.138.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000		1.000.000.000	1.161.138.000	
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Objek)	14	34	19		19		24		29		34		39			PAMONG BUDAYA 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda					0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	300.000.000	
			Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Dengan Satuan:Objek)	1	20	4		8		12		16		20		24			PAMONG BUDAYA 1
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupat					0		0		175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000	550.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			en/Kota																	
			Meningkatnya pengelolaan cagar budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:Persentase)	20	100	20	0	20	0	20	175.000.000	20	175.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000		PAMONG BUDAYA 3
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya					0		0		75.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000	250.000.000	
			Terlaksananya Cagar	Jumlah Objek Cagar	0	12	0		2		3		3		4		4			PAMONG BUD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Budaya yang Dilindungi	Budaya yang Dilindungi (Dengan Satuan:Objek)																AYA 3
		2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan					0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	300.000.000	
			Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaa	24	30	0		0		26		28		30		32			PAMONG BUDAYA 3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Objek Pemajuan Kebudayaan	n yang Diinventarisasi (Dengan Satuan:Objek)																
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					3.817.895.000		2.113.520.400		4.800.000.000		5.100.000.000		5.500.000.000		8.500.000.000	21.331.415.400	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum (Dengan Satuan:Persentase)	65,46	13,12	78,78	3.817.895.000	9,79	2.113.520.400	11,13	4.800.000.000	12,85	5.100.000.000	13,12	5.500.000.000	14,20	8.500.000.000		KABID KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan pelestarian budaya di museum																	
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					3.817.895.000		2.113.520.400		4.800.000.000		5.100.000.000		5.500.000.000		8.500.000.000	21.331.415.400	
			Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum (Pelajar, Umum dan Wisatawan)	Jumlah Pengunjung Museum (Dengan Satuan:Kunjungan)	10773	120426	19260	3.817.895.000	21146	2.113.520.400	23500	4.800.000.000	26520	5.100.000.000	30000	5.500.000.000	34260	8.500.000.000		KEPALA UPTD MUSEUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu					0		0		100.000.000		100.000.000		300.000.000		800.000.000	500.000.000	
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi	0	9	0		0		3		3		3		3			KEPALA UPTD MUSEUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terpadu	Secara Terpadu (Dengan Satuan:Unit)																
		2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	4.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	500	500	500		500		500		500		500		500			KA. TU UPTD MUSEUM
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana					2.206.059.000		293.290.400		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	3.399.349.400	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Museum																	
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	47	1		1		15		15		15		15			-
		2.22.06.2.01.00005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					811.836.000		760.082.000		1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	5.571.918.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1			-
		2.22.06.2.01.0014	Pengelolaan Operasional Museum					0		260.148.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	2.060.148.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Dengan Satuan:Layanan)	0	3	0		3		3		3		3		3			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.22.06.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya					0		0		1.000.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	2.800.000.000	
			Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya (Dengan Satuan:Unit	1	3	0		0		3		3		3		3			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Budaya	)																
		2.22.06.2.01.0017	Revitalisasi Taman Budaya					0		0		0		0		0		2.500.000.000	0	
			Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman B u d a y a y a n g Direvitalisasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		1			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Outcome Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.22.06.2.01.0018	Pengelolaan Operasional Taman Budaya					0		0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	3.000.000.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Dengan Satuan:Layanan)	0	1	0		0		1		1		1		1			-
TOTAL:							32.956.664.705		42.368.261.323		56.670.813.600		59.401.813.600		63.239.490.814		4.378.000.000		254.637.044.042	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Disbudpar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Disbudpar yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	
Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	**Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya**	**Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata**	**Persentase**	**23.70**	**21,21**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**PAD sektor pariwisata : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan. Rumus = (PAD Pariwisata tahun n-tahun (n-1))/tahun (n-1) dikali 100%**
	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	13,49	12,46	21,43	10,59	11,70	14,29	7,50	14,29	Rumus = Jumlah kunjungan wisatawan tahun n – tahun (n-1) dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1)
	Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase	10,89	11,16	12,05	12,54	12,74	12,99	13,25	12,99	pelaku yang di data tahun (n) = target data tahun (n) + tahun (n-1) rumus : (tahun (n)-tahun lalu (n-1)) / tahun lalu (n-1) x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	
	Meningkatkan efisiensi danefektivitas pelayanan pemerintahan.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Indeks	90,72	90,92	90,95	90,98	91,01	91,04	91,08	91,04	Berdasarkan **PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017**, IKM dihitung menggunakan formulasi berikut: $IKM = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times 25$ Hasil akhir IKM berada pada skala 0–100 dan dikategorikan dalam interval mutu pelayanan: **Nilai IKM** — **Kategori Mutu Pelayanan** 88,31 – 100 — Sangat Baik 76,61 – 88,30 — Baik 65,00 – 76,60 — Cukup Baik 51,00 – 64,99 — Kurang Baik ≤ 50,99 — Tidak Baik
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	**Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan serta meningkatkan pelestarian warisan budaya**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.**	**Persentase**	**5.65**	**19.5**	**34.52**	**50**	**65.48**	**80.95**	**100**	**80.95**	**rata-rata nilai dari Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap objek budaya tak benda (%)**
	Meningkatnya pelestarian cagar budaya benda dan tak benda	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	persentase	7.14	21,43	35.71	50	64.29	78.57	100	78.57	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi keseluruhan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ditetapkan x 100%
		Persentase	perse	4.17	16,6	33.33	50	66.67	83.3	100	83.33	

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	
		warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap objek budaya tak benda	ntase		7				3			

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Definisi Operasional/Rumusan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	5,65%	19,05%	38,10%	53,57%	69,05%	84,52%	100,00%	Rata2 persentase Pertumbuhan Cagar Budaya dan tak benda yang dilestarikan
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	30,09	46,34	37,78	49,49	60,69	71,49	81,97	Rata2 persentase benda dan tak benda
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	20,83%	17,39%	22,73%	27,27%	31,82%	36,36%	40,91%	Jumlah Tenaga Kebudayaan yang tersertifikasi dibagi jumlah pegawai di bidang Kebudayaan dikali 100%
Pariwisata										
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	NA	12,5	15	17,5	20	22,5	25	Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N-Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1 dibagi Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N-1 dikali 100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Definisi Operasional/Rumusan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	10,64%	13,56%	13,56%	14,29%	12,50%	11,11%	8,00%	Jumlah wisatawan tahun n dikurang jumlah wisatawan tahun (n-1) dibagi jumlah wisatawan tahun (n-1) dikali 100%
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	6,70%	30,52%	48,75%	64,01%	76,55%	86,50%	94,04%	Jumlah yang memiliki HAKI dibagi dengan jumlah pelaku ekraf yang terdata dikali 100%

Tabel 4.3 Program Unggulan dan Prioritas

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Termasuk ke dalam Program Prioritas Wali kota dan Wakil Walikota Batam ke 8. Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Termasuk ke dalam Program Prioritas Wali kota dan Wakil Walikota Batam ke 12. Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se Kota Batam
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Termasuk ke dalam Program Prioritas Wali kota dan Wakil Walikota Batam ke 15. Peningkatan investasi dan destinasi MICE
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
		Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

Program Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
Kegiatan utama meliputi peningkatan kapasitas, kreativitas, dan daya saing pelaku industri pariwisata serta ekonomi kreatif melalui:

a) Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif.
b) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui pelatihan dasar dan pendampingan berkelanjutan.

Program ini merupakan bagian dari Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ke-8, yaitu "Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif."

2. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup:

a) Pengelolaan kebudayaan yang melibatkan masyarakat melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
b) Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan.
c) Pelestarian kesenian tradisional serta pemberian penghargaan kepada pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

Program ini mendukung Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ke-12, yaitu "Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se-Kota Batam."

3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui pengelolaan yang berkelanjutan, profesional, dan inovatif. Ruang lingkup kegiatan meliputi:

a) Penetapan dan pengelolaan daya tarik wisata unggulan.
b) Peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata.
c) Penerapan prinsip destinasi pariwisata berkelanjutan.
d) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata agar memenuhi standar usaha yang berlaku.

Program ini sejalan dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ke-15, yaitu "Peningkatan investasi dan destinasi MICE."

4. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini difokuskan pada peningkatan promosi dan pemasaran destinasi wisata agar mampu menjangkau pasar domestik maupun internasional.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a) Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
b) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata secara langsung maupun melalui pameran, festival, dan kegiatan promosi lainnya.
c) Penguatan promosi destinasi wisata melalui berbagai media cetak, elektronik, dan digital.

Melalui program ini, diharapkan citra Kota Batam sebagai destinasi pariwisata unggulan dan pusat investasi dapat semakin dikenal secara luas.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Disbudpar Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang yang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Disbudpar Kota Batam dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Disbudpar. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Renstra Disbudpar ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Disbudpar.

Permasalahan perencanaan pembangunan daerah sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Disbudpar . Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Disbudpar.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga tingkat kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

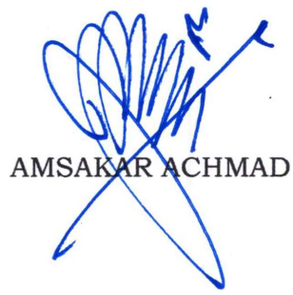
Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Disbudpar. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat, jika dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Disbudpar sebagai satuan kerja perangkat daerah

yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Disbudpar Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Batam.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD